



LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN 1 TAHUN 2018

**Belum Ada Standar Penulisan Berita Yang Dimiliki
Oleh Sub Bagian Media Cetak**

Oleh :

ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I

NIP. 198509242018011001

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2018

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN 2018

NAMA : ERLANGGA PANJI SAMUDRO, S.I.Kom.
NIP : 199306232018011003
JABATAN : JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
INSTANSI : SEKRETARIS JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Jakarta, 2 Oktober 2018

Mengetahui,
Coach



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
196902082003121003

Menyetujui,
Mentor



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang telah diberikan sehingga penyusunan laporan aktualisasi dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Laporan aktualisasi ini memuat aktifitas kegiatan pengaktualisasian Nilai-Nilai Dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ini dapat terlaksana dengan baik.

Terlaksananya seluruh kegiatan penyusunan laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, masukan dan kerjasama berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Rahayu Setya Wardani, S.H, M.M selaku Kepala Pusat pendidikan dan Pelatihan sekaligus penguji laporan kegiatan aktualisasi.
2. Bapak Y.O.I. Tahapari, S.H, M.M selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
3. Bapak Drs. Mohammad Djazuli, M.Si, selaku Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial yang telah membantu Penulis selama kegiatan aktualisasi berlangsung;
4. Bapak Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. selaku Kepala Subbagian Media Cetak sekaligus Mentor yang telah membimbing Penulis dalam penyusunan laporan kegiatan aktualisasi;
5. Bapak Agus Supriyono, S.S., M.A.P selaku coach yang membantu Penulis dalam pembuatan laporan kegiatan aktualisasi.
6. Bapak Mastur Prantono, M. Husen, Agung Sulistiono, Sofyan Efendi serta Ibu Suciati, selaku Jurnalis/Reporter senior yang membantu Penulis pada kegiatan aktualisasi.
7. Teman-teman dari tim Bagian Media Cetak dan Media Sosial yang turut memberikan dukungan dan bantuan baik moril ataupun materil selama kegiatan berlangsung.
8. Teman-teman CPNS Biro Pemberitaan Parlemen dan teman seangkatan CPNS yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kegiatan aktualisasi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Rancangan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Jakarta, 28 September 2018

Erman Suhendri, S.Sos.I

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.1. Unit Kerja	1
1.1.1. Biro Pemberitaan Parlemen	1
1.1.2. Bagian Media Cetak dan Media Sosial	2
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Peserta	2
1.3. Deskripsi Isu	3
1.3.1. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG	3
1.3.2. Kondisi Masalah	3
1.3.3. Dampak Yang Terjadi Jika Masalah Tidak Diselesaikan	4
1.3.4. Dukungan Teoritik dari Mata Pelatihan Terkait	4
1.3.5. Rumusan Isu	5
2. Nilai-nilai Organisasi	5
3. Tujuan	6
II. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	7
1. Penjelasan Perubahan	7
2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi	10
3. Analisis Manfaat dan Dampak	12
3.1. Manfaat	12
3.2. Dampak	13
4. Tantangan dan Hambatan	13
III. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI	14
IV. PENUTUP	17
1. Kesimpulan	17
2. Saran	19

LAMPIRAN

BAGIAN I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Organisasi/Unit Kerja

Penulis saat ini ditempatkan di Biro Pemberitaan Parlemen, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Subbagian Media Cetak.

1.1.1. Biro Pemberitaan Parlemen

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 232 Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Dalam pasal 233 tercantum fungsi dari Biro Pemberitaan parlemen yaitu:

- Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen;
- Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen;
- Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
- Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website;
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- Penyelenggaraan televisi dan radio;
- Penyelenggaraan urusan penerbitan;
- Penyelenggaraan kehumasan;
- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;

- Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

1.1.2. Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Sebagaimana tercantum pada Pasal 235, Bagian Media Cetak dan media Sosial mempunyai tugas mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website, serta melaksanaan analisis media. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak;
- Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial dan website;
- Pelaksanaan analisis media;
- Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen; dan
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

Sedangkan Subbagian Media Cetak mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak dan website.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Peserta

Penulis memiliki jabatan sebagai Jurnalis di Bagian Media Cetak, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Meliput kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk bahan penyusunan press release;
- Menyusun artikel terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

- Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan penyusun artikel;
- Menyampaikan press release kepada media massa untuk dipublikasikan;
- Menyusun konsep pres release kepada atasan.

1.3. Deskripsi Isu

1.3.1. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum ada standar penulisan berita yang dimiliki oleh Sub-Bagian Media Cetak	5	4	5	14
2	Kurangnya Pemanfaatan Server Sebagai Sarana <i>file Sharing</i> Untuk Pengumpulan Materi Parlementaria	4	3	3	10
3	Pentingnya alat perekam sebagai penunjang reporter dalam melakukan peliputan berita	3	2	3	8

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah : Isu ke-1 dengan rumusan isu : Belum ada standar penulisan berita yang dimiliki oleh Sub-Bagian Media Cetak

1.3.2. Kondisi Masalah

Bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI dalam penulisan dan peliputan sebuah berita selayaknya mempunyai sistematika atau tata cara penulisan naskah jurnalistik. Sistematika tersebut dibuat agar seorang jurnalis media cetak mempunyai panduan ketika menulis berita yang kelaknya akan dimuat di Media Online, Buletin dan Majalah Parlementaria. Dalam penggunaannya, gaya penulisan jurnalistik harus efektif dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan visi-misi Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

Sistematika penulisan yang dimaksud di atas merupakan sistematika penulisan naskah jurnalistik bagi internal reporter sub bagian Media Cetak dan Media Sosial. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika seorang akan menuliskan

berita pada media. Karena sistematika penulisan berita dari masing-masing media biasanya cukup memiliki banyak aturan dan tatacara. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca dapat memahami berita yang dihasilkan sesuai dengan angle berita yang dibuat oleh reporter dan ditetapkan oleh redaksi.

1.3.3. Dampak yang Terjadi Jika Masalah Tidak Diselesaikan

Di bagian Media Cetak dan Media Sosial terkhusus pada sub bagian media cetak hingga saat ini memiliki 11 orang reporter dari latar belakang pendidikan yang beragam. Beberapa dari reporter tersebut baru bergabung di Bagian Media Cetak sejak awal tahun 2018.

Agar tidak terjadi ketimpangan yang berlarut dan bisa berujung pada terlambatnya penayangan berita yang ada di website www.dpr.go.id, maka perlu penyeragaman dan penyesuaian dengan gaya penulisan yang mewakili Visi dan Misi Setjen dan BK DPR RI.

1.3.4. Dukungan Teoritik dari Mata Pelatihan Terkait

Dalam merealisasikan rencana aktualisasi terpilih, dukungan teoritik yang diterapkan adalah:

a. Akuntabilitas

Merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dengan kata lain, kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

b. *Whole of Government*

Merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

c. Nasionalisme

Merupakan suatu sikap atau pandangan tentang cinta tanah air berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

d. Komitmen mutu

Melaksanakan setiap pekerjaan yang sesuai dengan kriteria kinerja dan berorientasi pada nilai-nilai dasar orientasi mutu untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

e. Pelayanan publik

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

1.3.5. Rumusan Isu

- a. Belum seragamnya mode penulisan berita di subbagian media cetak.
- b. Menumpuknya kerja redaktur sebelum merilis berita ke media DPR.
- c. Reporter yang baru bergabung dengan subbagian media cetak

2. Nilai-Nilai Organisasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Setjen dan BK DPR RI adalah aparatur pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.

Visi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Misi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian adalah:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.
2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR No. 03 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Pasal 4 berisi nilai-nilai dasar PNS adalah :

- Religius

Sikap religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Akuntabel

Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan;
- Memberikan teladan bagi lingkungan kerja;
- Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya.

- Profesional

Sikap profesional diwujudkan melalui tindakan:

- Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsif dalam rangka meningkatkan kinerja Setjen DPR RI;
- Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan.

- Integritas

Sikap integritas diwujudkan dengan tindakan:

- Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS;
- Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekjen DPR;
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak merugikan orang lain dan negara;
- Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

3. Tujuan

Tujuan diselesaiannya isu yang terpilih adalah agar tidak terjadi ketimpangan yang berlarut dan bisa berujung pada terlambatnya penayangan berita yang ada di website www.dpr.go.id yang disebabkan oleh penyeragaman tulisan yang dilakukan oleh redaktur agar sesuai mampu menjadi representasi dari DPR RI.

BAGIAN II.

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

ISU: Belum ada standar penulisan berita yang dimiliki oleh Sub-Bagian Media Cetak

1. Penjelasan Perubahan

Pada Kegiatan pertama yaitu Konsultasi dengan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial terkait rencana aktualisasi dengan dua tahapan kegiatan. Yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk menentukan jadwal agenda konsultasi dengan atasan Kepala Bagian (Kabag) Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) serta konsultasi dengan Kabag Medtaksos terkait dengan pelaksanaan aktualisasi.

Terdapat perubahan waktu pelaksanaan tahapan dimana semula tahapan kegiatan pertama akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei bergeser pada minggu keempat bulan Juni. Kemudian tahapan kedua masih pada kegiatan pertama juga dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni.

Perubahan waktu tersebut, bukannya tanpa alasan, karena pada minggu keempat bulan Mei dan minggu pertama di bulan Juni, Penulis masih memperbaiki rancangan proposal aktualisasi sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh penguji pada hari terakhir setelah seminar rancangan proposal.

Pada kegiatan kedua yaitu Pembentukan Tim *Quality Control* penyusunan draft buku standar penulisan berita subbagian media cetak DPR RI. Tahapan pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait rancangan laporan singkat berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada perubahan.

Perubahan pada tahapan kegiatan kedua, konsultasi dengan atasan (Kabag Media Cetak dan Media Sosial) terkait pembentukan Tim yang membantu penulis dalam merumuskan penulisan berita. Untuk menghemat waktu, tahapan kedua yang seyogyanya dilakukan pada minggu pertama bulan Juli, dimajukan ke minggu keempat bulan Juni.

Pada kegiatan ketiga, yaitu pengumpulan referensi tentang penulisan berita yang baik dan benar, dan bisa diaplikasikan pada media di DPR RI. Dengan beberapa tahapan mengumpulkan referensi dari berbagai instansi/lembaga pemberitaan. Penulis juga secara intens berdialog dengan tim yang sudah dibentuk

yang terdiri dari reporter senior yang ada di Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI.

Selain itu, penulis juga membandingkan gaya penulisan berita yang ada di beberapa media, diantaranya LKBN Antara, Kompas.com, Sindonews.com, Republika.co.id yang kemudian dijadikan bahan diskusi dengan reporter senior.

Kegiatan ketiga ini memakan waktu dua bulan, dikarenakan kesibukan reporter yang harus mengiringi banyaknya agenda DPR RI seperti rapat komisi, baik itu rapat di kantor, luar kantor serta kunjungan kerja ke berbagai daerah. Disela-sela kesibukan itulah penulis menyempatkan berdiskusi dengan reporter senior satu persatu. Penulis menganggap metode ini yang paling tepat guna menyiasati kesibukan yang ada di Bagian Media Cetak DPR RI.

Penambahan waktu yang dibutuhkan pada kegiatan ketiga, berdampak pada mundurnya kegiatan keempat yaitu mensosialisasikan draf rumusan dari tim tentang standar penulisan berita kepada rekan kerja reporter di subbag media cetak. Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor dan kabag terkait sosialisasi dengan rekan kerja.

Tak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada kegiatan ketiga, setelah memperbanyak draf rumusan, penulis menyosialisasikan hasil rumusan kepada rekan kerja utamanya adalah reporter satu persatu dan tidak pada forum rapat.

Terakhir pada kegiatan kelima, yaitu membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan laporan kegiatan aktualisasi serta membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi.

Kegiatan ini penulis mulai pada minggu pertama bulan September. Di minggu pertama, penulis menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial terkait telah selesainya kegiatan habituasi. Kemudian penulis juga memberikan draf hardcopy dan softcopy agar kedepan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya minggu kedua hingga minggu keempat bulan September, penulis membuat laporan terkait habituasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan persiapan seminar akhir Latsar CPNS DPR RI 2018

Tak hanya kepada sesama reporter, penulis juga memberikan draf hardcopy dan softcopy) kepada Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial agar kedepan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

Matriks pelaksanaan aktualisasi ;

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Konsultasi dengan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial terkait rencana aktualisasi	Melakukan konsultasi dengan mentor untuk menentukan jadwal agenda konsultasi dengan atasan (Kabag). Konsultasi dengan atasan (Kabag) terkait dengan pelaksanaan aktualisasi.	Surat keterangan persetujuan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bagian untuk melakukan aktualisasi	Konsultasi dengan mentor untuk menentukan jadwal agenda konsultasi dengan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Etika Publik) Selanjutnya meminta izin agar Kepala Bagian Medtaksos memberikan Surat Persetujuan pelaksanaan aktualisasi di subbag media cetak (Akuntabilitas)	Dengan adanya konsultasi dengan atasan dengan menyertakan surat, sejalan dengan visi misi setjen dan BK DPR RI dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik	Membiasakan diri memiliki perencanaan yang matang maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas.
2.	Pembentukan Tim yang terdiri dari reporter senior yang	Konsultasi dengan mentor terkait rancangan laporan	Terbitnya Surat Persetujuan dan terbentuknya Tim	Dalam kegiatan perencanaan dalam pembentukan Tim, penulis	Perencanaan dalam pembuatan standar penulisan berita di media DPR diharapkan	10

	membantu penulis dalam penyusunan draft buku standar penulisan berita subbagian media cetak DPR RI	<p>singkat.</p> <p>Konsultasi dengan atasan (Kabag Media Cetak dan Media Sosial) terkait pembentukan tim</p>	<p>penyusunan draft standar penulisan berita.</p>	<p>terlebih dahulu konsultasi dengan mentor serta mendapat masukan dari rekan kerja. (Etika Publik).</p> <p>Kemudian minta pertimbangan dan persetujuan dari Kabag Medtaksos terkait daftar nama yang diajukan yang dianggap memiliki kapabilitas. (Komitmen Mutu)</p>	<p>kelaknya akan turut mewujudkan tata kelola administrasi yang professional dan andal baik di lingkup Setjen dan BK DPR RI</p>	
3.	Pengumpulan referensi tentang penulisan berita yang baik dan benar, dan bisa diaplikasikan pada media di DPR	<p>Melakukan diskusi aktif dengan tim yang telah dibentuk</p> <p>Mengumpulkan referensi</p> <p>Mendiskusikan terkait referensi yang telah didapat.</p>	<p>Membuat rumusan dari hasil diskusi dengan tim.</p>	<p>Mengumpulkan referensi dari beberapa media (WOG)</p> <p>Selanjutnya dalam proses pembuatan Menjaga standar mutu dan memperhatikan penggunaan bahasa dari setiap yang dibuat (Komitmen Mutu-Akuntabilitas - Nasionalisme).</p>	<p>Mengumpulkan referensi serta melakukan diskusi dengan Tim yang sudah dibentuk membuat kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, hal ini bertujuan untuk terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, handal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.</p>	
4.	Sosialisasi draf rumusan Tim tentang standar penulisan berita kepada rekan kerja/reporter di subbag media cetak.	Konsultasi dengan mentor dan kabag terkait sosialisasi dengan rekan kerja.	Memberikan draf kepada Kabag Medtaksos	<p>Selanjutnya akan memberikan atau draf tersebut kepada Kabag Medtaksos dan juga rekan kerja di unit kerja (Akuntabilitas - Integritas)</p>	<p>Memberikan draf kepada Kabag Medtaksos kemudian mensosialisasikan kepada rekan kerja di subbagian media cetak tentang hasil dari rumusan Tim sejalan dengan misi organisasi</p>	

		<p>Memperbanyak draft hasil rumusan terkait penulisan berita di media pemberitaan DPR RI.</p>	<p>Mensosialisasikan ke masing-masing reporter yang ada di subbag media cetak</p>	<p>Mensosialisasikan hasil rumusan kepada rekan kerja (Etika Publik - Akuntabilitas)</p>
5.	Membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi.	<p>Konsultasi dengan mentor terkait pembuatan laporan kegiatan aktualisasi.</p> <p>Membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi.</p>	<p>Membuat laporan kepada Kabag medtaksos bahwasanya aktualisasi telah dilakukan.</p> <p>Membuat laporan akhir pelaksanaan Aktualisasi dilengkapi dengan bukti-bukti proses kegiatan.</p>	<p>Dalam kegiatan Konsultasi dengan mentor, bahwa akan melakukan kegiatan berikutnya pembuatan laporan. (Akuntabilitas – Etika Publik)</p> <p>Melaporkan ke Kabag Medtaksos bahwa kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan. (Akuntabilitas – Etika Publik)</p> <p>Pengerjaan pembuatan laporan lengkap atas pelaksanaan aktualisasi (Komutmen Mutu).</p>

3. Analisis Manfaat dan Dampak

3.1. Manfaat

Setelah rancangan aktualisasi dijalankan dan diterapkan, terdapat manfaat yang diterima sebagai berikut:

1. Individu Peserta

Penulis dapat mempelajari lebih dalam mengenai tugas pokok dan fungsi dari unit kerja. Selain itu, kegiatan ini mengajarkan menulis berita yang baik dengan mengikuti kaidah jurnalistik.

2. Unit Kerja

Dengan adanya panduan penulisan berita di bagian media cetak dan media sosial ini, unit kerja bisa dengan mudah menyeragamkan gaya penulisan. Serta bisa meringankan beban redaktur dalam mengoreksi berita dan dapat lebih cepat melakukan rilis ke media DPR RI.

Sebagai supporting sistem, unit kerja Bagian Media Cetak dan Media Sosial juga sudah mewujudkan Visi dari Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

3. Stakeholders

a. Anggota DPR RI

Manfaat yang bisa diterima langsung oleh anggota DPR RI adalah pencitraan positif yang dilakukan oleh reporter yang ada di Bagian Media Cetak dan Media Sosial melalui berbagai media, baik itu melalui melalui www.dpr.go.id, Buletin dan Majalah Parlementaria serta beberapa media social lainnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, Youtube dan lainnya.

Dengan disebutnya secara spesifik identitas yang melekat pada anggota DPR RI pada setiap pemberitaan seperti penyebutan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Jabatan dalam AKD, Fraksi, Dapil, dan lainnya, diyakini mampu turut mengangkat citra positif Anggota DPR RI berikut identitas tadi.

b. Konstien/Masyarakat

Penyebutan secara spesifik Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Jabatan dalam AKD, Fraksi, Dapil, dan lainnya mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa saja yang dilakukan wakilnya di Senayan.

3.2. Dampak

Nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan pengetahuan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI seperti Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), *Whole of Government* (WoG), dan Pelayanan Publik harus diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi. Akuntabilitas penting diterapkan, mengingat setiap kegiatan yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya kepada atasan, sehingga atasan dapat mengetahui apakah penulis mengerjakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.

Nilai Nasionalisme juga turut diterapkan dalam kegiatan ini, mengingat kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan bersama, sehingga semua dapat terlibat langsung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian apabila nilai Whole of Government tidak diterapkan, maka tentu penulis akan kesulitan untuk bekerja sama dengan divisi/departemen lain untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini.

Selain itu setiap tugas dilaksanakan dengan menjaga Komitmen Mutu. Apabila Komitmen Mutu tidak terjaga maka hasil akhir kegiatan aktualisasi tidak akan sesuai dengan keinginan yang sudah tercantum pada rancangan aktualisasi. Pelayanan publik yang berkualitas pun turut diterapkan, apabila budaya pelayanan tidak berjalan dengan baik dan berimbang pada kerja tim yang buruk, maka pekerjaan tidak akan berjalan baik dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

4. Tantangan/Hambatan

Secara umum alokasi waktu merupakan tantangan atau hambatan yang paling utama dihadapi penulis saat menjalankan rancangan aktualisasi. Padatnya kegiatan pada lembaga DPR RI baik itu agenda rapat, kunjungan, acara kenegaraan, dan lainnya, secara langsung berdampak pada padatnya kegiatan Biro Pemberitaan Parlemen khususnya Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

BAGIAN III.
JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Berikut matrik jadwal pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan penulis selama berada di unit kerja Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus				September				
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Kegiatan Ke-1 Konsultasi dengan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial terkait rencana aktualisasi.																		
	a) Tahapan : Melakukan konsultasi mentor untuk menentukan jadwal agenda konsultasi dengan pimpinan.																		
	b) Tahapan : konsultasi dengan Pimpinan terkait dengan pelaksanaan aktualisasi.																		
2.	Kegiatan Ke-2 Pembentukan Tim <i>Quality Control</i> penyusunan draft buku standar penulisan berita subbagian media cetak DPR RI																		
	a) Tahapan : konsultasi dengan mentor terkait rancangan laporan singkat.																		
	b) Tahapan : konsultasi dengan atasan dan Kabag Media Cetak dan Media Sosial terkait pembentukan Tim QC																		
	c) Tahapan :																		

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus				September				
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	perencanaan penggunaan kamera untuk dokumentasi rapat.																		
3.	Kegiatan Ke-3 Pengumpulan referensi tentang penulisan berita yang baik dan benar, dan bisa diaplikasikan pada media di DPR																		
	a) Tahapan : mengumpulkan referensi dari berbagai instansi/lembaga pemberitaan.																		
	b) Tahapan : mulai merumuskan standar penulisan berita untuk media pemberitaan DPR.																		
	c) Tahapan : penggunaan kamera untuk mendokumentasikan rapat dan tahapan mengumpulkan referensi.																		
4.	Kegiatan Ke-4 Sosialisasi draf rumusan Tim QC tentang standar penulisan berita kepada rekan kerja/reporter di subbag media cetak																		
	a) Tahapan : konsultasi dengan mentor dan kabag terkait sosialisasi dengan rekan kerja. memperbanyak draft hasil rumusan Tim QC terkait standar penulisan berita di media pemberitaan DPR.																		

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus				September				
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	b) Tahapan : memperbanyak draft hasil rumusan Tim QC terkait standar penulisan berita di media pemberitaan DPR																		
5.	Kegiatan Ke-5 Membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi.																		
	a) Tahapan : konsultasi dengan mentor terkait pembuatan laporan kegiatan aktualisasi.																		
	b) Tahapan : membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi.																		

Keterangan:

	:	Libur Idul Fitri
	:	Kunjungan Spesifik ke beberapa daerah (tanggal terlampir)
	:	Mengerjakan aktualisasi di kantor di kantor

BAGIAN IV. **PENUTUP**

A. KESIMPULAN

ISU: Belum ada standar penulisan berita yang dimiliki oleh Sub-Bagian Media Cetak

1. Kegiatan pertama: Konsultasi dengan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial terkait rencana aktualisasi. Dengan dua tahapan kegiatan. Yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk menentukan jadwal agenda konsultasi dengan atasan (Kabag) serta konsultasi dengan atasan (Kabag) terkait dengan pelaksanaan aktualisasi.

Penerapan nilai etika publik dan akuntabilitas pada kegiatan ini, dimana Penulis melakukan Konsultasi dengan mentor untuk menentukan jadwal agenda konsultasi dengan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial tak lupa proses administrasi juga diikuti dengan mengajukan surat pemberitahuan terkait akan dilaksakannya tugas aktualisasi di Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

2. Kegiatan kedua: Pembentukan Tim *Quality Control* penyusunan draft buku standar penulisan berita subbagian media cetak DPR RI. Tahapannya yaitu konsultasi dengan mentor terkait rancangan laporan singkat serta konsultasi dengan atasan (Kabag Media Cetak dan Media Sosial) terkait pembentukan Tim yang membantu penulis dalam merumuskan penulisan berita.

Penulis menerapkan nilai etika publik, komitmen mutu serta akuntabilitas pada kegiatan kedua ini. Tercermin dalam perencanaan pembentukan Tim, penulis terlebih dahulu konsultasi dengan mentor serta mendapat masukan dari rekan kerja. Penulis benar-benar memastikan tim yang membantu pada proses penulisan tersebut benar-benar memiliki kapabilitas dalam penulisan berita. Kemudian minta pertimbangan dan persetujuan dari Kabag Medtaksos terkait daftar nama yang diajukan yang dianggap memiliki kapabilitas. Agar tertibnya administrasi, penulis minta agar rekan kerja yang membantu perumusan masalah ini untuk diterbitkan Nota Dinas yang mendasari terlaksananya tugas ini.

3. Kegiatan ketiga: pengumpulan referensi tentang penulisan berita yang baik dan benar, dan bisa diaplikasikan pada media di DPR RI. Tahapan mengumpulkan

referensi dari berbagai instansi/lembaga pemberitaan. Penulis juga secara intens berdialog dengan tim yang sudah dibentuk yang terdiri dari reporter senior yang ada di Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI.

Selain itu, penulis juga membandingkan gaya penulisan berita yang ada di beberapa media, diantaranya LKBN Antara, Kompas.com, Sindonews.com, Republika.co.id yang kemudian dijadikan bahan diskusi dengan reporter senior.

Penulis menerapkan nilai-nilai *Whole Of Goverment* (WoG), komitmen mutu, nasionalisme serta akuntabilitas. Dimana penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik bagi unit kerja juga isntansi tempat penulis bernaung. Hal tersebut tercermin dengan referensi yang coba dikumpulkan dari beberapa media, kemudian didiskusikan bersama tim rekan kerja untuk mencari pola penulisan yang mewakili institusi DPR RI.

4. Kegiatan keempat : mensosialisasikan draf rumusan dari tim tentang standar penulisan berita kepada rekan kerja reporter di subbag media cetak. Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor dan kabag terkait progres yang telah dicapai pada kegiatan sebelumnya. Kemudian memperbanyak draf sebagai bahan untuk mensosialisasikan kepada rekan agar diterapkan pada tiap-tiap penulisan berita.

Pada kegiatan ini penulis menerapkan nilai akuntabilitas, integritas, etika publik. Yang mana finalisasi yang telah dilakukan dari kegiatan sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu ke Kabag Media Cetak dan Media Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada unit kerja. Setelah itu mulai sosialisasi kepada rekan kerja secara bergantian dengan memanfaatkan waktu senggang sehingga tidak mengganggu kesibukan mereka lainnya.

5. Kegiatan kelima : Membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Tahapan pertama yang dilakukan adalah konsultasi dengan mentor terkait pembuatan laporan kegiatan aktualiasasi serta membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Kemudian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial terkait telah selesainya kegiatan habituasi. Kemudian penulis juga memberikan draf hardcopy dan softcopy agar kedepan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu barulah penulis membuat laporan secara lengkap terkait tugas aktualisasi ini serta mempersiapkan untuk seminar akhir Latsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.

Pada kegiatan terakhir ini, penulis menerapkan budaya akuntabilitas, etika publik dan komitmen mutu. Dimana dalam pelaporannya, penulis berupaya menyertakan bukti-bukti kegiatan yang telah dilangsungkan.

B. Saran

1) Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penulis sangat berterimakasih kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI yang telah berupaya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dengan sebaik mungkin. Kemudian penulis mengusulkan agar ada aturan yang baku dan *dipublish* agar bisa diketahui oleh semua pihak tak terkecuali instansi lain yang mungkin menjadikan Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI sebagai rujukan dalam melaksanakan pelatihan. Kedepan, penulis berharap agar Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI terus berinovasi dalam menciptakan sumberdaya manusia yang tangguh.

2) Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Unit kerja telah memberikan yang terbaik untuk membantu CPNS dalam menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya dalam masa habituasi. Seluruh elemen yang ada memberikan dukungan dan bantuan agar rancangan aktualisasi dapat diaktualisasikan dengan baik. Kesibukan pada unit kerja memang sedikit menyulitkan peserta diklat untuk menyelesaikan kegiatan ini, mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilakukan membuat waktu pelaksanaan sedikit berubah namun peserta diklat mampu menyelesaikan seluruh kegiatan dengan baik. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat kegiatan habituasi merupakan waktu bagi CPNS untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja namun tetap harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja melalui kegiatan aktualisasi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

KEGIATAN I

Jakarta, 25 Juni 2018

Kepada Yth,
Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini saya beritahukan kepada Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI, bahwasanya saya:

Nama : Erman Suhendri
NIP : 198509242018011001
Jabatan : Jurnalis
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Terhitung tanggal 23 mei 2018 sudah kembali ke unit kerja setelah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Setjen dan BK DPR RI 2018. Saat ini saya akan melaksanakan tugas Aktualisasi dengan mengangkat tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”**.

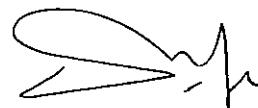
Atas dukungan dan kerjasamanya, kami haturkan terimakasih.

Mengetahui
Mentor



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

Hormat Kami
CPNS Setjen Dan BK DPR RI



Erman Suhendri, S.Sos.I
198509242018011001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

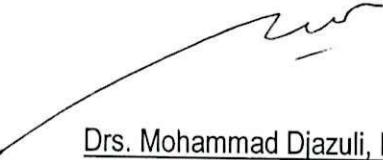
NOTA DINAS
Nomor : 668/BP.01/06/2018

Kepada. : Erman Suhendri
Dari : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Aktualisasi
Tanggal : 26 Juni 2018

Menindaklanjuti pemberitahuan terkait tugas Aktualisasi CPNS Setjen dan BK DPR RI di Unit Kerja Bagian Media Cetak dan Media Sosial, maka dengan ini kami menyetujui pelaksanaan tugas tersebut oleh Sdr. Erman Suhendri dengan mengangkat tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”**.

Demikian Surat Persetujuan ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Kabag Media Cetak
Dan Media Sosial


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si
Nip. 196510311994031002

Tembusan:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
2. Pertinggal

LAMPIRAN

KEGIATAN II

Jakarta, 25 Juni 2018

- Kepada Yth,
Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan Nama-nama yang akan dilibatkan dalam pelaksanakan tugas Aktualisasi di Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan mengangkat tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”**.

No.	Nama	Jabatan
1.	Suciati, S.Sos	Kasubag Analis Media
2.	Sofyan Efendi	Redaktur
3.	Agung Sulistiono, S.H.	Jurnalis
4.	Mastur Prantono	Jurnalis
5.	M. Husen	Jurnalis
6.	Rahayu Setiowati	Jurnalis

Mohon kiranya Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyetujui nama-nama tersebut diatas untuk terlibat dalam tugas Aktualisasi yang akan saya laksanakan.

Atas dukungan dan kerjasamanya, kami haturkan terimakasih.

Mengetahui
Mentor



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

Hormat Kami
CPNS Setjen Dan BK DPR RI



Erman Suhendri, S.Sos.I
198509242018011001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 669/BP.01/06/2018

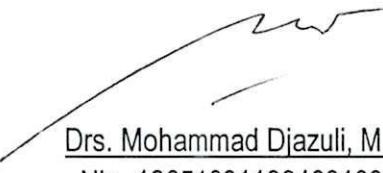
Kepada. : Erman Suhendri
Dari : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Hal : Persetujuan Tim
Tanggal : 26 Juni 2018

Menindaklanjuti pemberitahuan terkait yang akan terlibat dalam tugas Aktualisasi CPNS Setjen dan BK DPR RI di Unit Kerja Bagian Media Cetak dan Media Sosial, maka dengan ini kami menyetujui Nama-nama berikut untuk membantu pelaksanaan tugas Aktualisasi oleh Sdr. Erman Suhendri dengan mengangkat tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”**:

No.	Nama	Jabatan
1.	Suciati, S.Sos	Kasubag Analis Media
2.	Sofyan Efendi	Redaktur
3.	Agung Sulistiono, S.H.	Jurnalis
4.	Mastur Prantono	Jurnalis
5.	M. Husen	Jurnalis
6.	Rahayu Setiowati	Jurnalis

Demikian Surat Persetujuan ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Kabag Media Cetak
Dan Media Sosial


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si
Nip. 196510311994031002

Tembusan:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
2. Pertinggal

LAMPIRAN

KEGIATAN III



DISKUSI DENGAN REDAKTUR



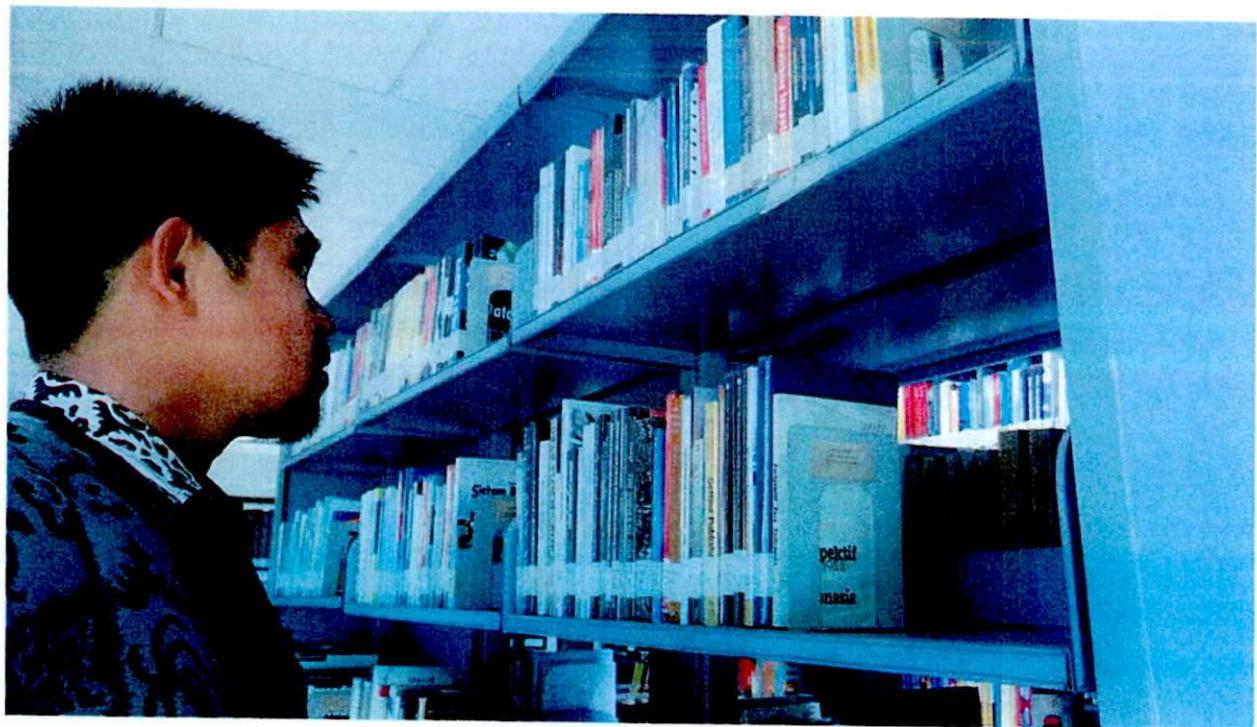


MENGUNJUNGI SEKOLAH BERITA LKBN ANTARA DISKUSI DENGAN PEWARTA ANTARA





STUDI LITERASI



Membuat Judul Berita

Ada beberapa hal yang harus diingat untuk pembuatan judul berita tersebut.

1. Mencerminkan Isi

Kesukaan Pembaca

Judul berita harus mencerminkan isi berita. ~~Orang~~ ~~begitu~~ membaca judul, sudah ~~bisa~~ memperkirakan isi yang ~~dapat~~ disajikan dalam berita itu.

Contoh judul: *akan*

Judul:

Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Bekerja Secara Sehat

Intro/Lead berita:

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah hukum yang membelit internal PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Jawa Timur, sehingga permasalahan di TPPI tidak berlarut-larut dan segera beroperasi kembali pasca di take over oleh pemerintah.

Perhatikan antara judul dengan isi lead atau intro berita, tidak terjadi kesesuaian. Dalam lead / intro berita lebih membahas TPPI Tuban yang belum beroperasi secara normal dikarenakan masih banyak permasalahan yang menghimpitnya. Sedangkan kesan yang muncul setelah membaca judul tersebut Komisi VII DPR menaruh harapan yang besar agar TPPI Tuban kembali beroperasi dengan normal.

Perbaikan Judul:

"Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Beroperasi"

2. Kalimat Pendek dan Atraktif

Judul merupakan etalase atau tempat memamerkan sesuatu agar orang tertarik. Wartawan harus memanfaatkan hal itu agar beritanya menarik pembaca dengan judul. Karena itu, wartawan disarankan menggunakan kalimat pendek dan atraktif dalam menulis judul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atraktif bermakna mempunyai daya tarik atau sifat yang menyenangkan. Kesan atraktif itu akan muncul dalam judul berita ketika menggunakan kalimat pendek, kata aktif dan penggunaan kata yang tepat.

Contoh belum perbaikan:

Legislator, BUMN Perbankan Harusnya jadi Agent Of Development

Setelah Perbaikan:

BUMN Perbankan Seharusnya jadi Agen Pembangunan

3. Penggunaan Nama

Judul yang berisikan nama seseorang sebaiknya hanya digunakan pada tokoh yang dikenal luas di kalangan masyarakat.

Contoh:

Bambang Soesatyo Jadi Warga Kehormatan TNI Angkatan Laut → atau AL

Fadli Zon Imbau Pemerintah Secepatnya Cegah Karhutla

Fahri Hamzah Sarankan Presiden Segera Bentuk BRR

Utut Adianto Terima Kunjungan Bupati Biak Numfor

Nama yang tercantum dalam judul itu merupakan nama yang ~~sangat~~ dikenal masyarakat.

Cukup

4. Judul Kutipan

Hampir sama dengan judul pertanyaan, judul kutipan juga harus hati-hati digunakan.

Ada persyaratan dalam berita itu jika ingin menggunakan judul kutipan, antara lain isi dari kutipan itu sangat kuat secara kemanusiaan atau akan memunculkan persepsi yang krusial.

Contoh:

Ketua DPR: Kondusifitas Pemilu 2019 Perlu Dijaga

Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga

5. Judul Menggunakan Istilah Daerah atau Asing

Penggunaan istilah daerah atau istilah asing pada penulisan judul terkadang sulit dihindari, walaupun istilah tersebut sudah akrab ditelinga tetap diberi tanda petik.

Contoh:

Persoalan "Illegal Drilling" Di Jambi Sangat Ironis

Note:

Ada permasalahan pada pemrograman website DPR RI oleh BDTI, dimana untuk judul yang menggunakan bahasa asing atau bahasa探文, tidak bisa ditulis miring (italic), sehingga terpaksa diberi tanda kutip.

- **Lead Berita**

Lead atau Teras Berita merupakan bagian paling penting dari fakta yang dikumpulkan. Lead berita terdapat di alinea pertama yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bagian paling penting dari fakta yang diberitakan
2. Ditulis lengkap, singkat, dan padat
3. Disajikan secara sederhana, mudah dipahami, dan menarik

Lead memuat lengkap jawaban terhadap pertanyaan 5W + 1H (what, who, where, when, why, dan how), namun penulisannya harus singkat dan padat jumlah kata biasanya antara 26-30 kata. Kadang tidak semua jawaban 5W+1H bisa dimuat dalam lead, karena kalau dipaksakan alineanya akan terlalu panjang. Jika demikian, maka unsur *why* dan atau *how* bisa dimuat di alinea berikutnya.

Pedoman untuk menulis lead/teras berita adalah:

1. *singkat*, artinya langsung menuju pokok persoalan.
2. *spesifik*, artinya harus secara tepat menceritakan pokok persoalan.
3. *identifikasi dengan jelas*, artinya menjawab pertanyaan berita
4. *hindari bentuk pertanyaan atau kutipan*, artinya teras berita memberikan jawaban bukan pertanyaan
5. *nyatakan waktu dengan tepat*, artinya berita yg disampaikan harus baru, sebab waktu adalah elemen yg terpenting.
6. *beri keterangan dengan tepat*, artinya berikan keterangan yang secara rinci dan jelas
7. *Bukalah teras berita dengan kalimat yang menonjolkan unsur-unsur yg paling kuat dalam kalimat berita.*
8. *Ikuti pegangan untuk menulis suatu kelengkapan gagasan dalam satu kalimat.*

↑Fakta

9. Lead bisa kesimpulan dari keseluruhan badan berita. Sehingga dengan membaca lead berita, pembaca sudah memahami isi berita.

10. Bisa sebab atau akibat, mengacu pada konsep piramida pembuatan berita

- BODY BERITA

Tubuh berita (news body) merupakan tempat di mana berita terletak. Dalam tubuh beritalah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya, dalam arti bukan rangkuman. Karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting, tubuh berita hendaknya ditulis semenarik mungkin, sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut, namun dengan tetap menjaga keringkasan berita (karena ruang yang terbatas dalam surat kabar).

Tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik, dengan susunan kronologis, maupun dengan susunan di mana informasi penting diletakkan di belakang. Selain teknik penyusunan tubuh berita, membuat berita yang baik juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan tubuh berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi kata-kata kunci; memakai kata maupun frase transisi yang tepat serta menyusun struktur berita dengan benar dan mengalir.

Di samping itu kekuatan tubuh berita dapat pula dibangun dengan menyertakan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber berita; menyertakan nama/jabatan sumber berita (attribution); memberi identifikasi yang jelas tentang siapa sumber berita serta menyertakan latar belakang berita.

Pentingnya transisi antar paragraf pada tubuh berita. Jika membahas hal yang berbeda, usahakan transisi tetap berlangsung dengan baik dan mudah dipahami.

Kutip dari media lain, dengan mengutip sumber berita, atau menuliskan kalimat; "Dari sejumlah pemberitaan di media nasional, diketahui bahwa".

- **Kutipan Dalam Berita**

Kutipan yang baik bisa mendukung pembuka dan memperkuat informasi dalam berita. Kutipan yang baik juga akan membuat pembaca seolah-olah mendengar pembicaranya sehingga menambah perhatian pada berita.

Ada beberapa pegangan untuk menentukan penggunaan kutipan yaitu:

1. Bila kutipan itu menarik dan informatif.
2. Untuk mendukung pembuka, paragraf inti, atau masalah (*supporting point*) dalam berita.
3. Untuk menyampaikan opini dan perasaan sumber.
4. Bila kutipan itu sangat deskriptif dan dramatis.

- a. **Kutipan langsung**

Kutipan semacam ini menuliskan kata demi kata dari apa yang dikatakan pembicara. Kutipan ini dibuka dan ditutup dengan tanda kutip. Jurnalis juga diperkenankan menyeleksi kata per kata tanpa mengurangi makna ucapan narasumber tersebut.

Kutipan asli:

"Bisa gak, kita kasih turunan aturan PKPU ini untuk daerah tertentu seperti di Papua itu karena berdasarkan kearifan lokal akan diberlakukan khusus untuk hal ini."

Setelah dilakukan penyeleksian kata:

"Bisa tidak, dibuatkan turunan aturan PKPU ini untuk daerah tertentu seperti di Papua, karena berdasarkan kearifan lokal akan diberlakukan kebijakan khusus menyangkut hal ini,"

- b. **Kutipan tidak langsung**

Kutipan ini berisi apa yang kurang lebih dikaitkan oleh pembicara dan bagaimana cara penyampainnya. Disini tanda kutip tidak dipakai. Contohnya: Bambang mengatakan ~~dewan harus~~ mempertimbangkan apakah tersedia anggaran untuk membangun gedung baru.

Sumber langsung:

Karena ada jutaan yang belum terdaftar di papua. Sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak konstitusi mereka, kemudia asas kedaulatan rakyat tidak benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang dasar dan UU pemilu itu sendiri.

Setelah dijadikan kutipan tidak langsung:

Politisi partai Demokrat ini berpendapat, kalau jutaan masyarakat papua tidak bisa menggunakan hak konstitusi mereka, maka azas kedaulatan rakyat yang ada di Negara ini benar-benar tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU) pemilu itu sendiri.

- **5W + 1H dalam penulisan berita**

Hal yang paling penting dari teks berita yaitu harus mengandung unsur 5W+1H. Berikut adalah contoh pertanyaan 5W+1H pada teks berita yang jawabannya harus ada pada teks berita tersebut.

Who (Siapa), Why (Mengapa), What (Apa), When (Kapan), Where (Dimana), How (Bagaimana)

Sebuah teks berita yang baik setidaknya harus mengandung jawaban dari keenam pertanyaan diatas (atau yang sejenis 5W+1H) agar teks tersebut menjadi berita yang utuh dan sempurna.

(<http://www.materikelas.com/contoh-teks-berita/>)

Pemerintah Didorong Berinvestasi Maksimal ke TPPI Tuban

Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mendorong pemerintah dan juga PT. Pertamina (persero) untuk berinvestasi secara maksimal dalam rangka menghidupkan lagi Kilang PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Harapannya, TPPI Tuban bisa menghasilkan produk yang ditugaskan pemerintah.

"Pihak TPPI membutuhkan dana setidaknya 3-5 *billion* dolar AS untuk pengembangan, hingga menghasilkan produk seperti yang diharapkan pemerintah," ujar Dony saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Kilang TPPI Tuban, Jatim, Jumat (24/8/2018).

Dikatakan Dony, saat ini pemerintah baru berinvestasi pada sektor biaya produksi saja. Dimana perputaran dari dana yang dikucurkan tersebut tidak cukup untuk membayar investasi pemerintah, melainkan hanya cukup untuk membayar gaji dari pegawai TPPI Tuban yang berjumlah sekitar 700 orang.

"Kalau melihat situasi saat ini, TPPI Tuban hanya memproduksi atau bisa dikatakan pemanfaatan sesaat dan sementara. TPPI menghasilkan premium dan pertamax, tergantung dari pesanannya. Tetapi yang saya lihat di sini, *concern* TPPI sendiri bukan kedua produk tersebut," terang legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini.

"Jadi memang masih harus dilakukan konstruksi lagi, pengembangan lagi untuk menjadi hasil produk yang sebetulnya ditunggu dan diharapkan. TPPI sendiri ke depan merencanakan akan memproduksi aromatic (paraxylene) agar memperkuat industri petrokimia dalam negeri, agar dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap impor," tambah legislator dapil Jawa Barat ini.

Sebagai gambaran, TPPI Tuban yang didirikan sejak tahun 1995 oleh Tirtamas, merupakan anak perusahaan dari PT. Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). TPPI sendiri saat itu memiliki teknologi paling modern di Indonesia. Namun krisis

- moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, memaksa perusahaan tersebut diserahkan oleh pemiliknya kepada pemerintah.
- Kemudian Tuban Petro dibentuk pada tahun 2001 sebagai sebuah *holding* untuk penyelesaian utang PT. Tirtamas Majutama. Tuban Petro dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai upaya penyelesaian utang Rp3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama kepada sejumlah bank. (es/sf)

What (Apa) : n.enghidupkan lagi Kilang PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Who (Siapa) : Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon

Why (Mengapa) : menghasilkan produk yang ditugaskan pemerintah.

When (Kapan) : Jumat (24/8/2018).

Where (Dimana) : di Tuban, Jawa Timur.

How (Bagaimana) : Pihak TPPI membutuhkan dana setidaknya 3-5 *billion* dolar AS untuk pengembangan, hingga menghasilkan produk seperti yang diharapkan pemerintah.

Pentingnya 5 W + 1 H dan Piramida Terbalik

Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, dan informatif. Kualitas berita tentu harus memenuhi kriteria umum penulisan, yaitu 5W+1H yang sudah diluar kepala buat seorang jurnalis. Selain syarat tersebut, sebenarnya ada juga syarat yang juga wajib dimengerti oleh seorang jurnalis, yaitu persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik syarat bentuk ini lebih sering dikenal dengan sebutan 'Piramida Terbalik'. Kenapa disebut Piramida Terbalik, karena bentuknya memang mirip dengan piramida namun posisinya terbalik.

5W=1H adalah singkatan dari "what, who, when, where, why, how," yang dalam bahasa Indonesia menjadi "apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana." Semua unsur inilah yang harus terkandung dalam sebuah berita.

Artikel berbentuk berita memiliki struktur unik: Inti informasi ditulis pada alinea awal (disebut sebagai "lead" atau "teras berita"; biasanya satu hingga dua paragraf), data-data penting menyusul pada alinea-alinea selanjutnya, lalu penjelasan tambahan, dan diakhiri dengan informasi lain yang bukan bersifat informasi utama. Inilah yang disebut sebagai piramida terbalik.

Kenapa harus menggunakan metode Piramida Terbalik, tentu maksudnya adalah agar pembacara dapat segera mengetahui inti dari berita yang ingin diketahuinya. Apalagi

disaat seperti sekarang yang serba cepat. Berita online misalkan, sebaiknya dalam menyampaikan berita langsung ke pokok beritanya. Informasi-informasi penting (inti) disajikan di awal paragraf, selanjutnya informasi pendukung mengikuti paragraf berikutnya. Bagi pembaca sebuah artikel, piramida terbalik memudahkannya menangkap inti cerita, sebab informasi yang paling pokok langsung diberikan sejak alinea-alinea awal.

Bagi wartawan maupun redaktur, akan memudahkan dalam penulisan dan editing berita, karena mereka lebih fokus pada pokok pikiran berita yang mereka tuliskan. Sedangkan redaktur pun akan sangat mudah dalam menyunting ataupun memotong berita, tinggal menghapus paragraf-paragraf akhir yang dianggap tidak terlalu penting. Sedangkan bagi media dengan penulisan Piramida Terbalik ini, akan menghemat space halaman.

- **Penulisan satuan mata uang**

Rp bukan singkatan dari rupiah, melainkan simbol mata uang. Jadi, penulisannya akan menjadi seperti ini: **Rp1.000,00**. (Setelah Rp tidak diikuti titik (.) atau spasi.)

- Hal ini mencegah penambahan angka dan mengubah nominal.
- Misalnya Rp 1.000,00 bisa disisipi angka lain, katakanlah 9 sehingga menjadi Rp91.000.000,00.

Untuk memudahkan pembaca, dalam penulisan satuan mata uang bisa dikombinasikan dengan ejaan huruf.

Misal: *Dalam RDP ini, Komisi II DPR RI mendengarkan penyampaian pagu anggaran ORI sebesar Rp150.718.755.000 yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ORI 2019.*

Untuk mempermudah membaca, penulisan nominal tersebut dapat disingkat hingga tiga angka di belakang koma:

Dalam RDP ini, Komisi II DPR RI mendengarkan penyampaian pagu anggaran ORI sebesar Rp150,718 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ORI 2019.

Discpalcati menggunakan spasi.
(Acuan Koran Kompas).

KBBI Online, tidak menggunakan
spasi

- **Penulisan Singkatan atau Akronim**

Singkatan dipakai jika nama itu muncul berulang-ulang dalam satu tulisan, nama tersebut ditulis lengkap ketika muncul pertama kali disertai keterangan dalam tanda kurung. Dan pada kalimat berikutnya cukup ditulis singkatannya saja

Misal :

Legislator Pertanyakan SOP Dukcapil Terhadap KTP-el Rusak

*Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan **standard operating procedure (SOP)** Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang diterapkan dalam mengelola Kartu Tanda Penduduk Elektrik (KTP-el), terutama pada KTP-el yang sudah dinyatakan rusak.*

*“Ada yg bilang, kalau KTP-el yang rusak atau tidak terpakai lagi, dikembalikan ke pusat. Ini kan repot, kalau dari Papua dikembalikan ke Jawa,” kata Nini, sapaan akrabnya, saat ditemui **Parlementaria** di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).*

Nini menyayangkan kondisi seperti ini terulang kembali. Disaat pemerintah sangat getol meminta rakyat untuk melakukan perekaman KTP-el, kemudian ada yg mengeluh karena sudah sejak lama belum mendapatkan KTP-el, namun di sisi lain, manajemen KTP sendiri oleh Dukcapil tidak jelas. “Peristiwa ini cukup melukai hati rakyat,” imbuah Nini.

“Dari beberapa daerah yang saya kunjungi dan tanyakan perihal KTP-el yang rusak, Dukcapil daerah juga seperti kebingungan dan tidak ada kejelasan bagaimana prosedurnya apakah dikembalikan atau dipotong,” papar legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Nini pun memberikan sorotan pada kejadian dimana sebanyak 2.910 keping KTP dan 9 kartu keluarga (KK) yang ditemukan oleh warga pada Senin (10/9/2018) di Kampung Tariklot RT 03/RW 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nini meragukan keterangan dari Dukcapil Serang yang mengatakan bahwasanya dokumen yang ditemukan di semak-semak tersebut adalah KTP dan KK yang telah rusak. Kecil kemungkinan pihak Dukcapil melakukan pengecekan satu per satu terhadap 2900 KTP, baik itu rusak fisik dan juga rusak data.

“Kita tidak pernah tahu. Kalau rusak fisik, kita bisa lihat dengan kasat mata. Tetapi kalau rusak data, itu yang harus kita waspadai. Karena hanya pihak Dukcapil saja yang bisa tahu dengan peralatan yang dimilikinya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. (es/sf)

Beberapa Aturan yang biasa digunakan oleh Jurnalis Bagian Media Cetak DPR RI

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan *supporting system* dan harus terus memberikan dukungan demi kelancaran tugas DPR sebagai Lembaga legislatif. Sudah selayaknya Jurnalis yang bekerja pada instansi tersebut turut mendukung kelancaran kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya.

Pada penulisan berita, jurnalis DPR wajib mengangkat citra 560 anggota legislatif melalui pemberitaan yang baik.

Secara umum, penulisan berita yang berlaku di Media Cetak dan Media Sosial Setjen dan BK DPR RI sama dengan media lainnya. Tetapi ada beberapa bagian yang menjadi catatan yang membedakannya dengan media lain.

Penulisan tempat dan waktu:

1. Nama Tempat, Area/Kabupaten/Kota, Provinsi, Hari (tanggal/bulan/tahun)

Contoh:

"Kita akan pastikan terlebih dahulu dalam rapat dengan Badan Intelijen Nasional (BIN), apakah kesahihan data ini benar adanya karena kami sendiri memang tidak ingin kekuatan radikalisme ini menguat di lingkungan aparatur negara," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2018).

"Ada Panwaslu, ada Kepolisian, ada Kejaksaan, ada juga KPU. Tidak perlu bersikap anarkis. Soal emosi semua orang pasti emosi kalau ada persoalan. Tapi kita kan sudah menyiapkan saluran-saluran penyelesaiannya gitu," tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan saat ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/7/2018)

"Saya berharap dengan pembangunan tanggul menjadi lebih tinggi ini bisa mengurangi debit air yang turun, sehingga bisa mengurangi banjir di Kota Manado," harapnya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau pembangunan revitalisasi Danau Tondano, di Manado, Sulut, Rabu (11/7/2018).

Memperkenalkan Anggota melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta Jabatan dalam AKD tersebut:

"Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB," tulis **Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)** dalam akun Twitter-nya, Selasa (21/8/2018).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mendesak Kepolisian mengusut tuntas peristiwa meninggalnya tahanan di Polres Subang, Jawa Barat beberapa hari lalu. Seorang tahanan bernama Ade Diding meninggal setelah kritis dan sempat mendapat perawatan di Klinik Polres Subang kemudian dirujuk ke RSUD Ciereng, Subang.

Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi menilai, posisi Danau Tondano menjadi embrio dari penyebab banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya penanggulangan, yakni dengan revitalisasi dan pembangunan tanggul Danau Tondano.

Memperkenalkan Anggota berdasarkan fraksi melalui kata ganti:

Legislator ~~Politisi~~ Partai Golkar itu mengatakan, lokasi Sabang sangatlah strategis. Sabang sering dijadikan pelabuhan transit untuk barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Ia pun mempertanyakan mengapa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sangat kecil untuk ukuran daerah dengan potensi yang besar.

"Tidak usah kampanye, kalau masyarakat tahu Menteri tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, maka pasti akan terpilih lagi kok," tegas ~~politisi~~ dari Fraksi PKS ini.

Legislator ~~Politisi~~ dari Fraksi PKB ini memaparkan bahwa semangat DPR RI terhadap badan ini, agar menjadi kuat, full power dan bisa menjaga kedaulatan negara dan kepentingan rakyat di bidang karantina. Termasuk menjaga produk-produk lokal dalam negeri dari serangan perdagangan bebas dan persaingan global.

Memperkenalkan Anggota berdasarkan daerah pemilihan (dapil) melalui kata ganti:

"Nah di sini siapa yang diuntungkan? Tentunya yang diuntungkan adalah pengusaha besar. Jadi seperti ada upaya menekan perusahaan

menengah ke bawah menjadi dirugikan dan yang paling dirugikan adalah para konsumen," tandas ~~politisi~~ ~~dapil~~ **Sumatera Barat itu.**

Legislator

"Harapan kita, dengan adanya tenggelamnya kapal itu, jangan berpengaruh pada kunjungan wisata Danau Toba ini. Seperti yang saya katakan, itu murni kelalaian. Tidak ada di sini karena cuaca yang sangat berlebihan. Untuk langkah ke depan, kapal jangan melebihi kapasitas, baik manusianya ataupun barangnya. Yang penting keselamatan manusia yang menjadi skala prioritas kita," harap ~~politisi~~ ~~dapil~~ **Sumut itu.**

Legislator

Catatan:

1. Urutan penulisan laporan harus perlu diperbaiki dan disesuaikan.
2. ~~Hasil Dampak hukul aktualisasi~~, susunan fitur fitur hukul yg perlu menjadi perhatian, antara jadil dan sub jadil harus ada pemisahan

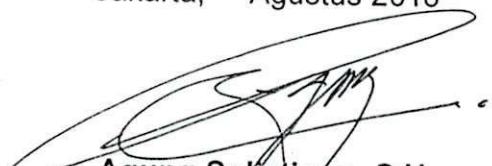
Jakarta, Agustus 2018



Agung Sulistiono, S.H.
197910222005021002

Quote:

Jakarta, Agustus 2018



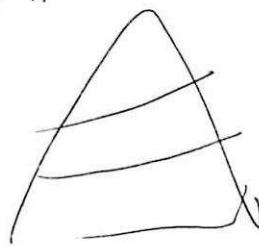
Agung Sulistiono, S.H.
197910222005021002

~~प्राचीन विद्या~~

"प्राचीन विद्या" का अर्थ
"प्राचीन विद्या" का अर्थ

"प्राचीन विद्या"

"प्राचीन विद्या" का अर्थ
प्राचीन विद्या



प्राचीन विद्या का अर्थ

प्राचीन विद्या का अर्थ
प्राचीन विद्या का अर्थ

प्राचीन विद्या का अर्थ

प्राचीन विद्या

प्राचीन विद्या

प्राचीन विद्या

प्राचीन विद्या

प्राचीन विद्या

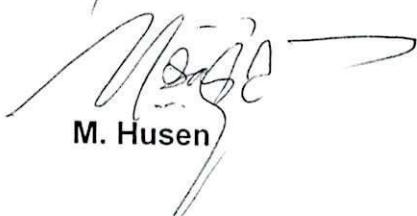
Catatan:

Secara umum sudah benar semua yang disajikan, sesuai kaidah jurnalistik. Hanya saja kaidah bahasa yang banyak kerap terabaikan. Penulisan ejaan harus sesuai tata bahasa. Misalnya, kata "disini" harusnya dituliskan terpisah, menjadi "di sini", karena menunjukkan keterbatasan. Kesalahan penulisan juga kerap terjadi pada kata "dikarenakan". Itu salah sama sekali. Kata "karena" tidak bisa diberi imbuhan "ki-kan". Harus ditulis seperti kata aslinya saja, "karena".

Begitu juga istilah asing atau daerah, menurut saya cukup diberi tanda miring, tidak perlu ditambah tanda petik ("") itu. Untuk menaungkan bahwa kata tersebut masih asing, belum menjadi kata dalam kamus bahasa Indonesia.

Apakah bule menurut kaidah jurnalistik belum tentu bule menurut kaidah bahasa!

Jakarta, 19 Agustus 2018


M. Husen

Quote:

- Kualitas tulisan sang jurnalis
gerinj kapasitas intelektualnya.
Semakin intelek, semakin tajam
dan berkualitas tulisannya.
- Ada perbedaan mendasar antara
ilmuan & jurnalis.
Ilmuwan hanya mengetahui satu
hal tapi mendalam.
Jurnalis mengetahui banyak
hal tapi tidak mendalam.

Jakarta, 15 Agustus 2018

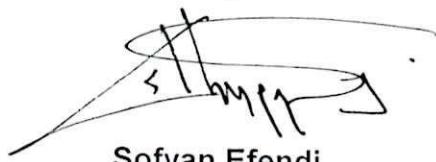

M. Husen

Catatan:

Tantangan dari seorang jurnalis sebuah lembaga negara adalah menciptakan sebuah berita tentang "keberatan", tanpa mengesampingkan "pencitraan".

Konsistensi penulisan sebuah berita menjadi hal yang penting agar anda tidak kehilangan "ruh" dari tulisan itu sendiri. Konsistensi itu harus diperlihatkan pada "style" tulisan anda dalam mengolah 5W+1H, tanpa meninggalkan fakta yang terjadi, dan layak publikasi.

Jakarta, Agustus 2018



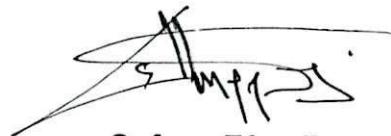
Sofyan Efendi

Quote:

"Jadilah seorang jurnalis yang pintar dan kritis, agar kau tahu fakta dan berita yang kau tulis".

"Tulisan dari seorang wartawan, selain bisa mengungkap kebenaran, juga dapat menimbulkan kebencian".

Jakarta, Agustus 2018



Sofyan Efendi

Catatan:

Dari catatan yang disampaikan, subah
seperi teori dan pokok bahasan jurnalistik now.

Seperi judul harus menggunakan tanda petik
ketika Berita yg tertulis, meski tidak di tulis
dengan

dari list / clinea atau berita .

Saya sepatut, judul sederhana menyebut
Berita yg ditulis, tentunya di web site
tidak pun belum pasang .

Lebih baik bisa dibuat 2 atau judul
berita .

Satu lagi dalam penulisan jurnal anggaran
dibuat sederhana, misalkan anggaran triiliun,
sekitar miliar, juta, ribu dst .

Cukup misalnya RAPBN 2013 Rp 2.000,55 . Triiliun

Jakarta, Agustus 2018



Mastur Prantono

Catatan:

Seiring waktu dan perkembangan di dunia jurnalis, saat ini untuk penulisan judul berita tidak lagi mengikuti aturan baku. Judul tidak lagi merupakan susunan panjang dan atau menjelaskan isi berita, yang terpenting judul ^{ketatnya persajingan di media} lead

itu menarik. Namun, sehingga pembaca ingin segera membaca berita tersebut.

Demikian juga dengan lead. Lead tidak melulu berada di paragraf pertama suatu berita. Sering kita jumpai lead baru kita temukan di paragraf kedua.

Idealnya, lead itu berisi lengkap terhadap pertanyaan SW+14 sebagai mana disebutkan penulis. Namun jurnalis saat ini, saya katakan "seperti sengaja" tidak memuat seluruh jawaban pertanyaan tersebut. Jurnalis sengaja membagi-baginya di SW+14

Paragraf-paragraf berikutnya, hal ini untuk membawa pembaca tidak berhenti sampai beberapa paragraf saja, tapi hingga tuntas berita itu.

Satu yang saya ingin tanyakan kepada penulis, bagaimana konten isi berita sendiri pada pengaturan yang akan diberikan bagi jurnalis Bagian Media Cetak?

Jakarta, Agustus 2018



Suciati, S.Sos

197207201994032002

Quote:

Jadi Jurnalis Dituntut Peningkatan Kapasitas
Intellectual, dengan 4C :
Communication
Collaboration
Critical thinking
Creativity

Jakarta, Agustus 2018



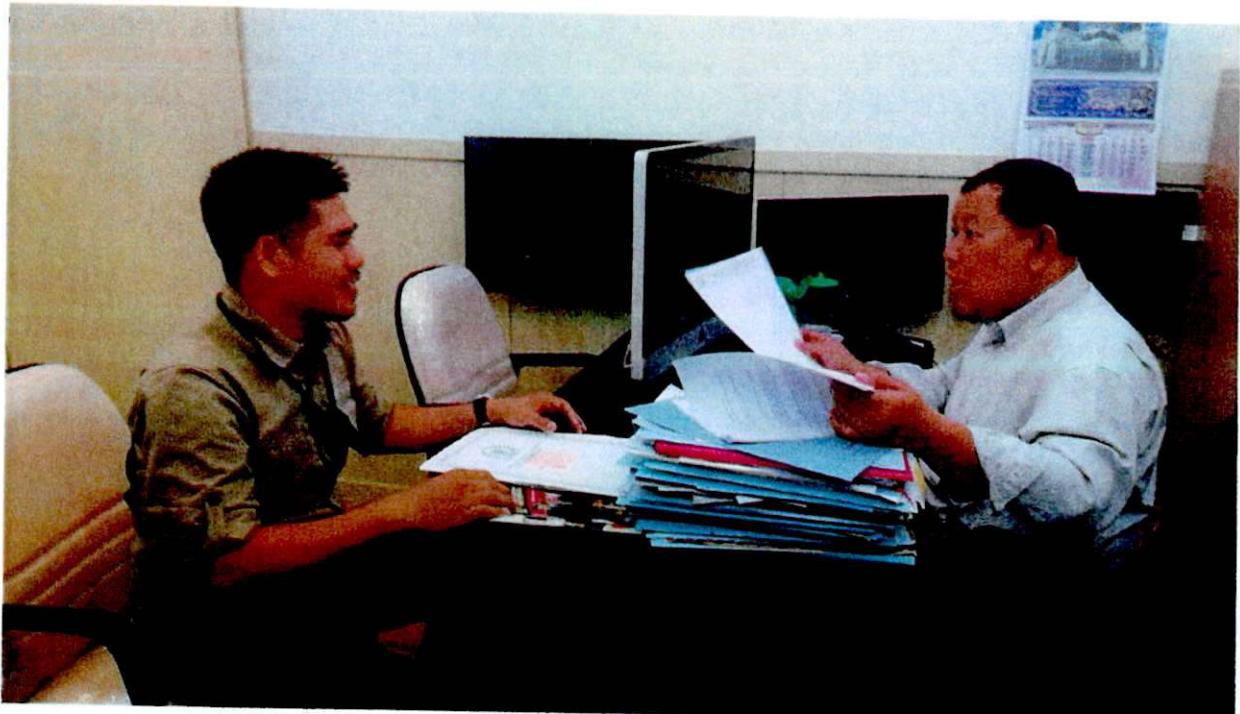
Suciati, S.Sos
197207201994032002

LAMPIRAN

KEGIATAN IV



MENYERAHKAN HASIL DISKUSI KEPADA KABAG MEDTAKSOS



MEMBUAT JUDUL BERITA

Ada beberapa hal yang harus diingat untuk pembuatan judul berita tersebut.

1. Mencerminkan Isi

Judul berita harus mencerminkan isi berita. Ketika pembaca membaca judul sudah memperkirakan isi yang akan disajikan dalam berita itu.

Contoh judul:

Judul:

Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Bekerja Secara Sehat

Intro/Lead berita:

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah hukum yang membelit internal PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Jawa Timur, sehingga permasalahan di TPPI tidak berlarut-larut dan segera beroperasi kembali pasca di take over oleh pemerintah.

Perhatikan antara judul dengan isi lead atau intro berita, tidak terjadi kesesuaian. Dalam lead / intro berita lebih membahas TPPI Tuban yang belum beroperasi secara normal dikarenakan masih banyak permasalahan yang menghimpitnya. Sedangkan kesan yang muncul setelah membaca judul tersebut Komisi VII DPR menaruh harapan yang besar agar TPPI Tuban kembali beroperasi dengan normal.

Perbaikan Judul:

Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Beroperasi

2. Kalimat Pendek dan Atraktif

Judul merupakan etalase atau tempat memamerkan sesuatu agar orang tertarik. Wartawan harus memanfaatkan hal itu agar beritanya menarik pembaca dengan judul. Karena itu, wartawan disarankan menggunakan kalimat pendek dan atraktif dalam menulis judul.

Atraktif bermakna mempunyai daya tarik atau sifat yang menyenangkan. Kesan atraktif itu akan muncul dalam judul berita ketika menggunakan kalimat pendek, kata aktif dan penggunaan kata yang tepat.

Contoh belum perbaikan:

Legislator, BUMN Perbankan Harusnya jadi Agent Of Development

Setelah Perbaikan:

BUMN Perbankan Seharusnya jadi Agen Pembangunan

3. Penggunaan Nama

Judul yang berisikan nama seseorang sebaiknya hanya digunakan pada tokoh yang dikenal luas di kalangan masyarakat.

Contoh:

Bambang Soesatyo Jadi Warga Kehormatan TNI AL

Fadli Zon Imbau Pemerintah Secepatnya Cegah Karhutla

Fahri Hamzah Sarankan Presiden Segera Bentuk BRR

Utut Adianto Terima Kunjungan Bupati Biak Numfor

Nama yang tercantum dalam judul itu merupakan nama yang cukup dikenal masyarakat.

4. Judul Kutipan

Hampir sama dengan judul pertanyaan, judul kutipan juga harus hati-hati digunakan. Ada persyaratan dalam berita itu jika ingin menggunakan judul kutipan, antara lain isi dari kutipan itu sangat kuat secara kemanusiaan atau akan memunculkan persepsi yang krusial.

Contoh:

Ketua DPR: Kondusifitas Pemilu 2019 Perlu Dijaga

Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga

5. Judul Menggunakan Istilah Daerah atau Asing

Penggunaan istilah daerah atau istilah asing pada penulisan judul terkadang sulit dihindari, walaupun istilah tersebut sudah akrab ditelinga tetap diberi tanda petik.

Contoh:

Persoalan “Illegal Drilling” Di Jambi Sangat Ironis

LEAD BERITA

Lead atau Teras Berita merupakan bagian paling penting dari fakta yang dikumpulkan. Lead berita terdapat di alinea pertama yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bagian paling penting dari fakta yang diberitakan
2. Ditulis lengkap, singkat, dan padat
3. Disajikan secara sederhana, mudah dipahami, dan menarik

Lead memuat lengkap jawaban terhadap pertanyaan 5W + 1H (what, who, where, when, why, dan how), namun penulisannya harus singkat dan padat jumlah kata biasanya antara 26-30 kata. Kadang tidak semua jawaban 5W+1H bisa dimuat dalam lead, karena kalau dipaksakan alineanya akan terlalu panjang. Jika demikian, maka unsur why dan atau how bisa dimuat di alinea berikutnya.

Pedoman untuk menulis lead/teras berita adalah:

1. Singkat, artinya langsung menuju pokok persoalan.
2. Spesifik, artinya harus secara tepat menceritakan pokok persoalan.
3. Identifikasi dengan jelas, artinya menjawab pertanyaan berita
4. Hindari bentuk pertanyaan atau kutipan, artinya teras berita memberikan jawaban bukan pertanyaan
5. Nyatakan waktu dengan tepat, artinya berita yg disampaikan harus fakta baru, sebab waktu adalah elemen yg terpenting.
6. Beri keterangan dengan tepat. artinya berikan keterangan yang secara rinci dan jelas
7. Bukalah teras berita dengan kalimat yang menonjolkan unsur-unsur yg paling kuat dalam kalimat berita.
8. Ikuti pegangan untuk menulis suatu kelengkapan gagasan dalam satu kalimat.
9. Lead bisa kesimpulan dari keseluruhan badan berita. Sehingga dengan membaca lead berita, pembaca sudah bisa memahami isi berita.
10. Bisa merupakan sebab-akibat, mengacu pada konsep piramida pembuatan berita.

TUBUH BERITA

Tubuh berita (news body) merupakan tempat di mana berita terletak. Dalam tubuh beritalah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya, dalam arti bukan rangkuman. Karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting, tubuh berita hendaknya ditulis semenarik mungkin, sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut, namun dengan tetap menjaga keringkasan berita (karena ruang yang terbatas dalam surat kabar).

Tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik, dengan susunan kronologis, maupun dengan susunan di mana informasi penting diletakkan di belakang.

Selain teknik penyusunan tubuh berita, membuat berita yang baik juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan tubuh berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi kata-kata kunci; memakai kata maupun frase transisi yang tepat serta menyusun struktur berita dengan benar dan mengalir.

Di samping itu kekuatan tubuh berita dapat pula dibangun dengan menyertakan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber berita; menyertakan nama/jabatan sumber berita (attribution); memberi identifikasi yang jelas tentang siapa sumber berita serta menyertakan latar belakang berita.

Pentingnya transisi antar paragraph pada tubuh berita, bila ingin membahas hal yang berbeda, usahakan menggunakan transisi kalimat yang mudah dipahami

KUTIPAN DALAM BERITA

Kutipan yang baik bisa mendukung pembuka dan memperkuat informasi dalam berita. Kutipan yang baik juga akan membuat pembaca seolah-olah mendengar pembicaranya sehingga menambah perhatian pada berita.

Ada beberapa pegangan untuk menentukan penggunaan kutipan yaitu:

1. Bila kutipan itu menarik dan informatif.
2. Untuk mendukung pembuka, paragraf inti, atau masalah (supporting point) dalam berita.
3. Untuk menyampaikan opini dan perasaan sumber.
4. Bila kutipan itu sangat deskriptif dan dramatis.

a. Kutipan langsung

Kutipan semacam ini menuliskan kata demi kata dari apa yang dikatakan pembicara. Kutipan ini dibuka dan ditutup dengan tanda kutip. Jurnalis juga diperkenankan menyeleksi kata per kata tanpa mengurangi makna ucapan narasumber tersebut:

Kutipan asli:

Bisa gak, kita kasih turunan aturan PKPU ini untuk daerah tertentu seperti di Papua itu karena berdasarkan kearifan lokal akan diberlakukan khusus untuk hal ini.

Setelah dilakukan penyeleksian kata:

“Bisa tidak, dibuatkan turunan aturan PKPU ini untuk daerah tertentu seperti di Papua, karena berdasarkan kearifan lokal akan diberlakukan kebijakan khusus menyangkut hal ini,”

b. Kutipan tidak langsung

Kutipan ini berisi apa yang kurang lebih dikaitkan oleh pembicara dan bagaimana cara penyampaiannya. Di sini tanda kutip tidak dipakai. Contohnya: Bambang mengatakan dewan harus mempertimbangkan apakah tersedia anggaran untuk membangun gedung baru.

Sumber langsung:

Karena ada jutaan yang belum terdaftar di papua. Sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak konstitusi mereka, kemudian asas kedaulatan rakyat tidak benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang dasar dan UU pemilu itu sendiri.

Setelah dijadikan kutipan tidak langsung:

Politisi partai Demokrat ini berpendapat, kalau jutaan masyarakat papua tidak bisa menggunakan hak konstitusi mereka, maka azas kedaulatan rakyat yang ada di Negara ini benar-benar tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU) pemilu itu sendiri.

5W + 1H PADA PENULISAN BERITA

Hal yang paling penting dari teks berita yaitu harus mengandung unsur 5W+1H. Berikut adalah contoh pertanyaan 5W+1H pada teks berita yang jawabannya harus ada pada teks berita tersebut.

Who (Siapa), Why (Mengapa), What (Apa), When (Kapan), Where (Dimana), How (Bagaimana)

Sebuah teks berita yang baik setidaknya harus mengandung jawaban dari keenam pertanyaan diatas (atau yang sejenis 5W+1H) agar teks tersebut menjadi berita yang utuh dan sempurna.

Pemerintah Didorong Berinvestasi Maksimal ke TPPI Tuban

Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mendorong pemerintah dan juga PT. Pertamina (persero) untuk berinvestasi secara maksimal dalam rangka menghidupkan lagi Kilang PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Harapannya, TPPI Tuban bisa menghasilkan produk yang ditugaskan pemerintah.

“Pihak TPPI membutuhkan dana setidaknya 3-5 billion dolar AS untuk pengembangan, hingga menghasilkan produk seperti yang diharapkan pemerintah,” ujar Dony saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Kilang TPPI Tuban, Jatim, Jumat (24/8/2018).

Dikatakan Dony, saat ini pemerintah baru berinvestasi pada sektor biaya produksi saja. Dimana perputaran dari dana yang dikucurkan tersebut tidak cukup untuk membayar investasi pemerintah, melainkan hanya cukup untuk membayar gaji dari pegawai TPPI Tuban yang berjumlah sekitar 700 orang.

“Kalau melihat situasi saat ini, TPPI Tuban hanya memproduksi atau bisa dikatakan pemanfaatan sesaat dan sementara. TPPI menghasilkan premium dan pertamax, tergantung dari pesanannya. Tetapi yang saya lihat di sini, concern TPPI sendiri bukan kedua produk tersebut,” terang legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Jadi memang masih harus dilakukan konstruksi lagi, pengembangan lagi untuk menjadi hasil produk yang sebetulnya ditunggu dan diharapkan. TPPI sendiri ke depan merencanakan akan memproduksi aromatic (paraxylene) agar memperkuat industri petrokimia dalam negeri, agar dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap impor,” tambah legislator dapil Jawa Barat ini.

Sebagai gambaran, TPPI Tuban yang didirikan sejak tahun 1995 oleh Tirtamas, merupakan anak perusahaan dari PT. Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). TPPI sendiri saat itu memiliki teknologi paling modern di Indonesia. Namun krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, memaksa perusahaan tersebut diserahkan oleh pemiliknya kepada pemerintah.

Kemudian Tuban Petro dibentuk pada tahun 2001 sebagai sebuah holding untuk penyelesaian utang PT. Tirtamas Majutama. Tuban Petro dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai upaya penyelesaian utang Rp3,2 triliun dari Grup Tirtamas Majutama kepada sejumlah bank. (es/sf)

What (Apa) : menghidupkan lagi Kilang PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Who (Siapa) : Anggota Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon

Why (Mengapa) : Menghasilkan produk yang ditugaskan pemerintah.

When (Kapan) : Jumat (24/8/2018).

Where (Dimana) : di Tuban, Jawa Timur.

How (Bagaimana) : Pihak TPPI membutuhkan dana setidaknya 3-5 billion dolar AS untuk pengembangan, hingga menghasilkan produk seperti yang diharapkan pemerintah.

Pentingnya 5 W + 1 H dan Piramida Terbalik

Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, dan informatif. Kualitas berita tentu harus memenuhi kriteria umum penulisan, yaitu 5W+1H yang sudah diluar kepala buat seorang jurnalis. Selain syarat tersebut, sebenarnya ada juga syarat yang juga wajib dimengerti oleh seorang jurnalis, yaitu persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik syarat bentuk ini lebih sering dikenal dengan sebutan 'Piramida Terbalik'. Kenapa disebut Piramida Terbalik, karena bentuknya memang mirip dengan piramida namun posisinya terbalik.

5W+1H adalah singkatan dari "what, who, when, where, why, how," yang dalam bahasa Indonesia menjadi "apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana." Semua unsur inilah yang harus terkandung dalam sebuah berita.

Artikel berbentuk berita memiliki struktur unik: Inti informasi ditulis pada alinea awal (disebut sebagai "lead" atau "teras berita"; biasanya satu hingga dua paragraf), data-data penting menyusul pada alinea-alinea selanjutnya, lalu penjelasan tambahan, dan diakhiri dengan informasi lain yang bukan bersifat informasi utama. Inilah yang disebut sebagai piramida terbalik.

Kenapa harus menggunakan metode Piramida Terbalik, tentu maksudnya adalah agar pembacara dapat segera mengetahui inti dari berita yang ingin diketahuinya. Apalagi disaat seperti sekarang yang serba cepat. Berita online misalkan, sebaiknya dalam menyampaikan berita langsung ke pokok beritanya. Informasi- informasi penting (inti) disajikan di awal paragraf, selanjutnya informasi pendukung mengikuti paragraf berikutnya. Bagi pembaca sebuah artikel, piramida terbalik memudahkannya menangkap inti cerita, sebab informasi yang paling pokok langsung dibeberkan sejak alinea-alinea awal.

Bagi wartawan maupun redaktur, akan memudahkan dalam penulisan dan editing berita, karena mereka lebih fokus pada pokok pikiran berita yang mereka tuliskan. Sedangkan redaktur pun akan sangat mudah dalam menyunting ataupun memotong berita, tinggal menghapus paragraf-paragraf akhir yang dianggap tidak terlalu penting. Sedangkan bagi media dengan penulisan Piramida Terbalik ini, akan menghemat space halaman.

BEBERAPA ATURAN YANG BIASA DIGUNAKAN OLEH JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DPR RI

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan supporting system dan harus terus memberikan dukungan demi kelancaran tugas DPR sebagai Lembaga legislatif. Sudah selayaknya Jurnalis yang bekerja pada instansi tersebut turut mendukung kelancaran kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya.

Pada penulisan berita, jurnalis DPR wajib mengangkat citra 560 anggota legislatif melalui pemberitaan yang baik.

Secara umum, penulisan berita yang berlaku di Media Cetak dan Media Sosial Setjen dan BK DPR RI sama dengan media lainnya. Tetapi ada beberapa bagian yang menjadi catatan yang membedakannya dengan media lain.

Adapun tantangan dari seorang jurnalis sebuah lembaga Negara adalah bagaimana menciptakan sebuah berita tentang kebenaran, tanpa mengesampingkan pencitraan.

Penulisan tempat dan waktu:

1. Nama Tempat, Area/Kabupaten/Kota, Provinsi, Hari (DD/M/YYYY)

Contoh:

“Kita akan pastikan terlebih dahulu dalam rapat dengan Badan Intelijen Nasional (BIN), apakah kesahihan data ini benar adanya karena kami sendiri memang tidak ingin kekuatan radikalisme ini menguat di lingkungan aparatur negara,” ujarnya saat ditemui **di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2018)**.

“Ada Panwaslu, ada Kepolisian, ada Kejaksaan, ada juga KPU. Tidak perlu bersikap anarkis. Soal emosi semua orang pasti emosi kalau ada persoalan. Tapi kita kan sudah menyiapkan saluran-saluran penyelesaiannya gitu,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan saat ditemui **di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/7/2018)**

“Saya berharap dengan pembangunan tanggul menjadi lebih tinggi ini bisa mengurangi debit air yang turun, sehingga bisa mengurangi banjir di Kota Manado,” harapnya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau pembangunan revitalisasi Danau Tondano, **di Manado, Sulut, Rabu (11/7/2018)**.

Memperkenalkan Anggota melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta Jabatan dalam AKD tersebut:

“Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB,” tulis **Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)** dalam akun Twitter-nya, Selasa (21/8/2018).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mendesak Kepolisian mengusut tuntas peristiwa meninggalnya tahanan di Polres Subang, Jawa Barat beberapa hari lalu. Seorang tahanan bernama Ade Diding meninggal setelah kritis dan sempat mendapat perawatan di Klinik Polres Subang kemudian dirujuk ke RSUD Ciereng, Subang.

Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi menilai, posisi Danau Tondano menjadi embrio dari penyebab banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya penanggulangan, yakni dengan revitalisasi dan pembangunan tanggul Danau Tondano.

Memperkenalkan Anggota berdasarkan fraksi melalui kata ganti:

Politisi Partai Golkar **DPR RI** itu mengatakan, lokasi Sabang sangatlah strategis. Sabang sering dijadikan pelabuhan transit untuk barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Ia pun mempertanyakan mengapa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sangat kecil untuk ukuran daerah dengan potensi yang besar.

“Tidak usah kampanye, kalau masyarakat tahu Menteri tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, maka pasti akan terpilih lagi kok,” tegas **Legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini**.

Legislator dari Fraksi PKB DPR RI ini memaparkan bahwa semangat DPR RI terhadap badan ini, agar menjadi kuat, full power dan bisa menjaga kedaulatan negara dan kepentingan rakyat di bidang karantina. Termasuk menjaga produk-produk lokal dalam negeri dari serangan perdagangan bebas dan persaingan global.

Memperkenalkan Anggota berdasarkan daerah pemilihan (dapil) melalui kata ganti:

“Nah di sini siapa yang diuntungkan? Tentunya yang diuntungkan adalah pengusaha besar. Jadi seperti ada upaya menekan perusahaan menengah ke bawah menjadi dirugikan dan yang paling dirugikan adalah para konsumen,” tandas politisi **dapil Sumatera Barat itu.**

“Harapan kita, dengan adanya tenggelamnya kapal itu, jangan berpengaruh pada kunjungan wisata Danau Toba ini. Seperti yang saya katakan, itu murni kelalaian. Tidak ada di sini karena cuaca yang sangat berlebihan. Untuk langkah ke depan, kapal jangan melebihi kapasitas, baik manusianya ataupun barangnya. Yang penting keselamatan manusia yang menjadi skala prioritas kita,” harap politisi **dapil Sumut itu.**

PENULISAN SATUAN MATA UANG

Rp bukan singkatan dari rupiah, melainkan simbol mata uang. Jadi, penulisannya akan menjadi seperti ini: **Rp1.000,00**. (Setelah Rp tidak diikuti titik (.) atau spasi.)

- Hal ini mencegah penambahan angka dan mengubah nominal.
- Misalnya Rp 1.000,00 bisa disisipi angka lain, katakanlah 9 sehingga menjadi Rp91.000.000,00.

Namun kesepakatan penulisan satuan mata uang di Bagian Medtaksos adalah setelah Rp diikuti dengan spasi.

- Contoh : Rp 1.000
- Rp 150 miliar

Untuk memudahkan pembaca, dalam penulisan satuan mata uang bisa dikombinasikan dengan ejaaan huruf.

Misal: Dalam RDP ini, Komisi II DPR RI mendengarkan penyampaian pagu anggaran ORI sebesar **Rp 150.718.755.000** yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ORI 2019.

Untuk mempermudah membaca, penulisan nominal tersebut dapat disingkat hingga tiga angka di belakang koma:

Dalam RDP ini, Komisi II DPR RI mendengarkan penyampaian pagu anggaran ORI sebesar **Rp 150,718 miliar** yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ORI 2019.

PENULISAN SINGKATAN ATAU AKRONIM

Singkatan dipakai jika nama itu muncul berulang-ulang dalam satu tulisan, nama tersebut ditulis lengkap ketika muncul pertama kali disertai keterangan dalam tanda kurung. Dan pada kalimat berikutnya cukup ditulis singkatannya saja

Misal :

Legislator Pertanyakan SOP Dukcapil Terhadap KTP-el Rusak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan **standard operating procedure (SOP)** Direktorat Jenderal **Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)** Kementerian Dalam Negeri yang diterapkan dalam mengelola Kartu Tanda Penduduk Elektrik (**KTP-el**), terutama pada KTP-el yang sudah dinyatakan rusak.

“Ada yg bilang, kalau **KTP-el** yang rusak atau tidak terpakai lagi, dikembalikan ke pusat. Ini kan repot, kalau dari Papua dikembalikan ke Jawa,” kata Nini, sapaan akrabnya, saat ditemui **Parlementaria** di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Nini menyayangkan kondisi seperti ini terulang kembali. Disaat pemerintah sangat getol meminta rakyat untuk melakukan perekaman **KTP-el**, kemudian ada yg mengeluh karena sudah sejak lama belum mendapatkan KTP-el, namun di sisi lain, manajemen KTP sendiri oleh **Dukcapil** tidak jelas. “Peristiwa ini cukup melukai hati rakyat,” imbuhan Nini.

“Dari beberapa daerah yang saya kunjungi dan tanyakan perihal **KTP-el** yang rusak, **Dukcapil** daerah juga seperti kebingungan dan tidak ada kejelasan bagaimana prosedurnya apakah dikembalikan atau dipotong,” papar legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Nini pun memberikan sorotan pada kejadian dimana sebanyak 2.910 keping KTP dan 9 **kartu keluarga (KK)** yang ditemukan oleh warga pada Senin (10/9/2018) di Kampung Tarikolot RT 03/RW 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nini meragukan keterangan dari **Dukcapil** Serang yang mengatakan bahwasanya dokumen yang ditemukan di semak-semak tersebut adalah KTP dan **KK** yang telah rusak. Kecil kemungkinan pihak Dukcapil melakukan pengecekan satu per satu terhadap 2900 **KTP**, baik itu rusak fisik dan juga rusak data.

“Kita tidak pernah tahu. Kalau rusak fisik, kita bisa lihat dengan kasat mata. Tetapi kalau rusak data, itu yang harus kita waspadai. Karena hanya pihak **Dukcapil** saja yang bisa tahu dengan peralatan yang dimilikinya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. (es/sf)

Jakarta, 5 September 2018

Kepada Yth,
Kepala bagian Media Cetak dan Media Sosial
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan draf Aktualisasi CPNS Setjen dan BK DPR RI di Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”** dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*.

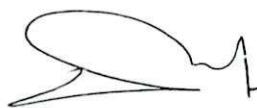
Demikian saya sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya, kami haturkan terimakasih.

Mengetahui
Mentor



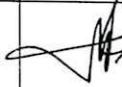
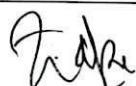
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

Hormat Kami
CPNS Setjen Dan BK DPR RI



Erman Suhendri, S.Sos.I
198524092018011001

**Sosialisasi dengan Jurnalis / Reporter
Bagian Media Cetak dan Media Sosial**

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan	Keterangan
	Hendra. S	Reporter		
	Surahmat Eko	Reporter		
	Rizka Arinindya	Reporter		
	Ria Nur Mega	Reporter		
	Taufan	Reporter		
	Erlangga P.S.	Jurnalis		
	Arimb'i Puspita Ratna	reporter		
	WISNU S.E.	Reporter		
	Tiara Annisa	Reporter		

Mengetahui

Mentor



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

Hormat Kami
CPNS Setjen Dan BK DPR RI



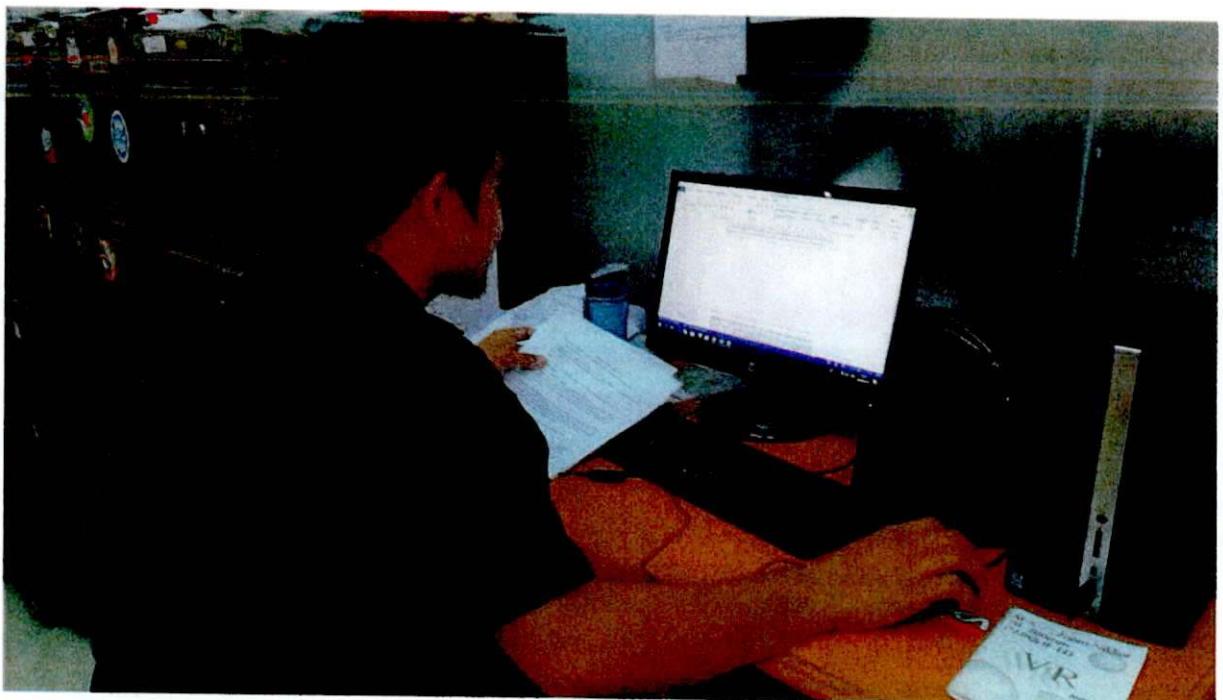
Erman Suhendri, S.Sos.I
198524092018011001

LAMPIRAN

KEGIATAN V



PEMBUATAN LAPORAN AKTUALISASI



Jakarta, 6 September 2018

Kepada Yth,
Kepala bagian Media Cetak dan Media Sosial
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan kepada Kepala bagian Media Cetak dan Media Sosial, bahwasanya Aktualisasi CPNS Setjen dan BK DPR RI di Bagian Media Cetak dan Media Sosial a.n Erman Suhendri, S.Sos.I dengan tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”** telah selesai dilaksanakan.

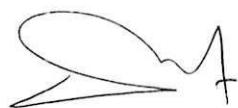
Demikian saya sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya, kami haturkan terimakasih.

Mengetahui
Mentor



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

Hormat Kami
CPNS Setjen Dan BK DPR RI



Erman Suhendri, S.Sos.I
198509242018011001

LAMPIRAN

MENTORING



MENTORING



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial

1) Kegiatan 1 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentoring	Waktu dan Media Mentoring
Tahapan Kegiatan	<p>Fontulir dengan mentor sewaktu minta persyarikat Kabag Mediasus, seluruh dilakukan</p>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<p>Surat kabar yang pertama dari banyak</p>	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Menjalankan etika public de alat publik</p>	
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi	<p>irrigasi dan kelola air ya guna</p>	
Penguatan Nilai Organisasi	<p>merencanakan yg banyak dari tiap "kegiatan"</p>	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial

2) Kegiatan 2 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentoring	Waktu dan Media Mentoring
Tahapan Kegiatan	diskusi bimbingan teknis pembinaan dan Quality control yg memudahkan pembaca nyaris	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	hasil keterwujukan persyaratan dari faktor teknis dari	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	menyalurkan efek publik dan akunabilitas	
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi	menyajikan tfs untuk administrasi yg baik	
Penguatan Nilai Organisasi	pembentukan penerapan dari setiap pelaksanaan	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial

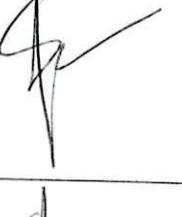
3) Kegiatan 3 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentoring	Waktu dan Media Mentoring
Tahapan Kegiatan	Berdasari dg fm selesai dilaksanakan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Pemasaran dg fm selesai ada	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Menyajikan informasi, komunikasi untuk akualifikasi profesional	
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi	dengan deskripsi yang pula tercantum menyajikan sebagian DKKH yg berisi, akurat	
Penguatan Nilai Organisasi	Adanya sesuatu yg perencanaan	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial

4) Kegiatan 4 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentoring	Waktu dan Media Mentoring
Tahapan Kegiatan	telah mampu menyosialisasi kepad rekan kerja	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	hasil file punya dan hasil diskusi	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Analisis, integritas dan etika publik hal dipahami	
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi	Bekerja dan persamaan de bentuk dan jalinan	
Penguatan Nilai Organisasi	Memberi dan persamaan	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

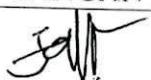
Nama Peserta	:	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial

5) Kegiatan 5 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentoring	Waktu dan Media Mentoring
Tahapan Kegiatan	menbuat Capom dalam dalam pelajaran	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Penulis Capom	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Aktifitas, oleh pelajar berinteraktif	
Kontribusi Terhadap Tujuan Organisasi	Cerumunan Aktifitas berintegritas	
Penguatan Nilai Organisasi	Melalui perencanaan	

DAFTAR HADIR
MENTORING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL :
WAKTU :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
2.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

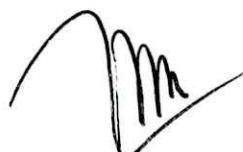
MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002

COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
MENTORING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL :
WAKTU :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
2.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002

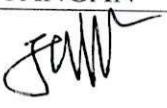
COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
MENTORING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL :
WAKTU :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
2.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002

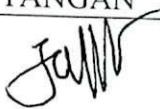
COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
MENTORING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL :
WAKTU :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
2.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002

COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
MENTORING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL :
WAKTU :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
2.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR

COACH


Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002


Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial

5) Kegiatan 5 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentoring	Waktu dan Media Mentoring
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi Terhadap Isu Organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

Jakarta, 6 September 2018

Kepada Yth,
Kepala bagian Media Cetak dan Media Sosial
Di Tempat

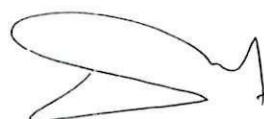
Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan kepada Kepala bagian Media Cetak dan Media Sosial, bahwasanya Aktualisasi CPNS Setjen dan BK DPR RI di Bagian Media Cetak dan Media Sosial a.n Erman Suhendri, S.Sos.I dengan tema **“Penulisan Berita Di Bagian Media Cetak dan Media Sosial”** telah selesai dilaksanakan.

Demikian saya sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya, kami haturkan terimakasih.

Mengetahui
Mentor


Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
198105032005021002

Hormat Kami
CPNS Setjen Dan BK DPR RI


Erman Suhendri, S.Sos.I
198524092018011001

LAMPIRAN

COACHING



COACHING



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Erman Sihendri
NIP	:	143504242018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media cetak & Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Penulisan berita di Bagian Media cetak & Media Sosial

1) Kegiatan 1 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	sesuai dengan perencanaan	6 Juli 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	tidak terencana	6 Juli 2018
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	terkait dengan akuntabilitas	6 Juli 2018
Kontribusi terhadap Tujuan organisasi	tidak terlaksana administrasi YG baik	6 Juli 2018
Penguatan Nilai Organisasi	selalu melalui perencanaan	6 Juli 2018

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Erman Suhendri
NIP	:	14850924 2018011001
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Rendisian Beniz di Bagian Media Cetak & media soal

2) Kegiatan 2 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	konsul for. dr galauka	13 Juli 2010
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Buletin hansi tetus ada	13. Juli 2010
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Amanahabilitas, etika publik	13. Juli 2010
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	fas kelola administrasi ts baik	13. Juli 2010
Penguatan Nilai Organisasi	peningkat melalui perencanaan	13. Juli 2010

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Erman Suhendri
NIP	:	(98509242018011001)
Unit Kerja	:	Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Pendekar Benih di Bagian Media Cetak & Media Sosial

3) Kegiatan 3 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Hasil tugas dilulus dgn baik	Januari 24-08-2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	output ada	Januari 24-08-2018
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	WJOG, komitmen untuk akuntabilitas & keandalan	Januari 24-08-2018
Kontribusi terhadap Tujuan organisasi	sebagai berdisiplin agar serasi dengan organisasi	Januari 24-08-2018
Penguatan Nilai Organisasi	Nilai organisasi sudah ada	Januari 24-08-2018

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Erman Suhendri
NIP	:	192509242018011001
Unit Kerja	:	Baprau Medu Cebul + Medu Sond
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Kendala Beniz di Baprau Medu Cebul & Medu Sond

4) Kegiatan 4 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Surveiasi, Miga keu dan Brkti form ftd	6 September 2018 ✓
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output sudah ada dan jalin	6 September 2018 ✓
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Temper nilai - akuntabilitas dan etika publik	6 September 2018 ✓
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Setuju dg tujuan Organisasi	6 September 2018 ✓
Penguatan Nilai Organisasi	Declar penerapan dalam tata cara kerja	6 September 2018 ✓

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Erman Suhendra
NIP	:	198509242018011001
Unit Kerja	:	Bagian media Cekah media Sosial
Jabatan	:	Jurnalis
Isu	:	Pendidikan Bentz di Bagian media cekah dan Media Sosial

5) Kegiatan 5 :

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Buat Capoz dan Cengkupi dg n puluri	12 Sept 2018
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Cengkupi Capoz	12 Sept 2018
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Akuntabilitas pihak-pihak komunitas untuk	12 Sept 2018
Kontribusi terhadap Tujuan organisasi	Akuntabel de organisasi	12 Sept 2018
Penguatan Nilai Organisasi	Sudah tidak lantang	12 Sept 2018

DAFTAR HADIR
 COACHING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL : Jumat , 6 Juli 2018
 WAKTU : 14.00

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAGINDA JAYA R.A.S, S.I.A	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
2.	CITRA ANANDA, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
3.	MAHIR PRATAMA, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
4.	ALDA GUSTARI, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
5.	AMMYTA PRADITA W, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
6.	ILA RACHMAYATI, S. IP	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
7.	MUSTAQIIM, S.Kom.I	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
8.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
9.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
10.	NATASYA ARNANDA P, S.Kom	ANALIS MEDIA BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
 NIP: 198105032005021002

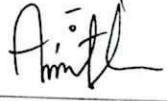
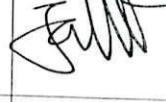
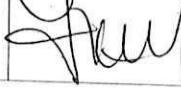
COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
 NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
COACHING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL : 13 Juli 2018
WAKTU : 14.00

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAGINDA JAYA R.A.S, S.I.A	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
2.	CITRA ANANDA, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
3.	MAHIR PRATAMA, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
4.	ALDA GUSTARI, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
5.	AMMYTA PRADITA W, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
6.	ILA RACHMAYATI, S. IP	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
7.	MUSTAQIIM, S.Kom.I	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
8.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
9.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
10.	NATASYA ARNANDA P, S.Kom	ANALIS MEDIA BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002

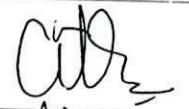
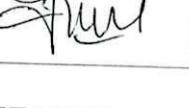
COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
COACHING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL : Jumat, 24 Agustus
WAKTU : 14.00

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAGINDA JAYA R.A.S, S.I.A	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
2.	CITRA ANANDA, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
3.	MAHIR PRATAMA, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
4.	ALDA GUSTARI, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
5.	AMMYTA PRADITA W, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
6.	ILA RACHMAYATI, S. IP	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
7.	MUSTAQIIM, S.Kom.I	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
8.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
9.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
10.	NATASYA ARNANDA P, S.Kom	ANALIS MEDIA BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR

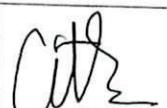
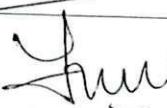
COACH

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002


Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
 COACHING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/ TANGGAL : 6. Kamis, 6 September 2018
 WAKTU : 13.00

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAGINDA JAYA R.A.S, S.I.A	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
2.	CITRA ANANDA, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
3.	MAHIR PRATAMA, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
4.	ALDA GUSTARI, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
5.	AMMYTA PRADITA W, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
6.	ILA RACHMAYATI, S. IP	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
7.	MUSTAQIM, S.Kom.I	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
8.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
9.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
10.	NATASYA ARNANDA P, S.Kom	ANALIS MEDIA BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
 NIP: 198105032005021002

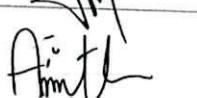
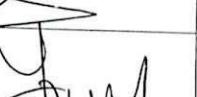
COACH



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
 NIP: 196902082003121003

DAFTAR HADIR
COACHING PROGRAM AKTUALISASI CPNS KELOMPOK 1
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

HARI/TANGGAL : Rabu, 12 September 2018
WAKTU : 16.00

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BAGINDA JAYA R.A.S, S.I.A	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
2.	CITRA ANANDA, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
3.	MAHIR PRATAMA, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
4.	ALDA GUSTARI, S.Sos	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
5.	AMMYTA PRADITA W, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
6.	ILA RACHMAYATI, S. IP	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
7.	MUSTAQIM, S.Kom.I	JURNALIS BAGIAN TELEVISI DAN RADIO PARLEMEN	
8.	ERLANGGA PANJI S, S.I.Kom	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
9.	ERMAN SUHENDRI, S.Sos.I	JURNALIS BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	
10.	NATASYA ARNANDA P, S.Kom	ANALIS MEDIA BAGIAN MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL	

MENGETAHUI,

MENTOR



COACH



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP: 198105032005021002

Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP: 196902082003121003

LAMPIRAN

SURAT TUGAS



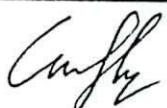
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 819/BP.01/9/2018

Yth : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII
Dari : Lakhar Kabag Media Cetak dan Media Sosial
Hal : Penugasan Staf
Tanggal : 7 September 2018

TANDA TERIMA	
TERIMA TGL	10-9-2018
DI TERIMA OLEH	USAIR
TERIMA JAM	
NO TELEPON / EXT	
TANDA TANGAN	

Menindaklanjut Nota Dinas nomor 329/KOM.VIII/9/2018 perihal peliputan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII. Maka dengan ini kami sampaikan nama Staf Media Cetak dan Media Sosial yang bertugas :

No	Nama	Daerah	Tanggal	Keterangan
1	Erman Suhendri, S.Sos.I	DIY	19 s.d. 21 September 2018	198509242018011001

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Lakhar Kabag Media Cetak
dan Media Sosial,



Suciati, S.Sos.
NIP. 197207201994032002

Tembusan Yth:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,
2. Kepala Bagian Kepegawaian.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 639/BP.01/07/2018

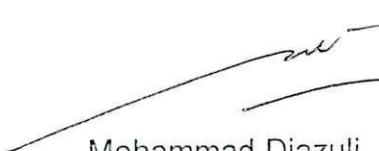
Yth : Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI
Dari : Kabag Media Cetak dan Media Sosial
Hal : Penugasan Staf
Tanggal : 11 Juli 2018

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 158/PS.11/7/2018 Perihal permintaan peliputan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI pada tanggal 20 s.d. 22 Juli 2018. Maka dengan ini kami sampaikan nama Staf Media Cetak dan Media Sosial yang bertugas :

No	Nama	Keterangan
1	Erlangga Panji Samudro, S.Ikom	199306232018011003
2	Erman Suhendri, S.Sos.I	198509242018011001
3	Runi Sari Budiati	PPNPN

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kabag Media Cetak dan Media Sosial,


Mohammad Djazuli

NIP. 196510311994031002

Tembusan Yth,

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.
2. Bagian Kepgawaiian;



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 754/BP.01/08/2018

Yth : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII
Dari : Kabag Media Cetak dan Media Sosial
Hal : Penugasan Staf
Tanggal : 20 Agustus 2018

TANDA TERIMA	
TERIMA TGL	
DITERIMA OLEH	
TELEFON/TELM	
NO TELEPON/EXT	
TANDA TANGAN	

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor DP/13872/SETJEN DAN K-DPRRI/PS.07/08/2018 Perihal permintaan Peliputan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII. Maka dengan ini kami sampaikan nama Staf Media Cetak dan Media Sosial yang bertugas :

No	Nama	Tanggal	Daerah	Keterangan
1	Hendra Sunandar	23 s.d. 25 Agustus 2018	Sumatera Utara	PPNPN
2	Erman Suhendra, S.Sos.I	23 s.d. 25 Agustus 2018	Jawa Timur	198509242018011001
3	Devi Iriandi	23 s.d. 25 Agustus 2018	Jambi	PPNPN

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kabag Media Cetak
dan Media Sosial,

Mohammad Djazuli,
NIP. 196510311994031002

Tembusan Yth,

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Bagian Kepgawaiian.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 786/BP.01/08/2018

Yth : Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI
Dari : a.n Kabag Media Cetak dan Media Sosial
Hal : Pergantian Nama Staf
Tanggal : 30 Agustus 2018

TANDA TERIMA	
TERIMA TGL	Almatice
DI TERIMA OLEH	
TERIMA JAM	
NO TELEPON / EXT	
TANDA TANGAN	

Menindaklanjuti Nota Dinas kami Nomor 785/EP.01/8/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Perihal permintaan Peliputan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI pada tanggal 7 s.d. 9 September 2018. Maka dengan ini kami sampaikan nama Staf Media Cetak dan Media Sosial yang bertugas :

No	Sebelumnya	Menjadi	Keterangan
1	Hendra Sunandar	Erman Suhendri, S.Sos.I	198509242018011001

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kabag Media Cetak
dan Media Sosial,


Suciati, S.Sos.I
NIP. 197207201994032002

Tembusan Yth,

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Bagian Kepegawaian.

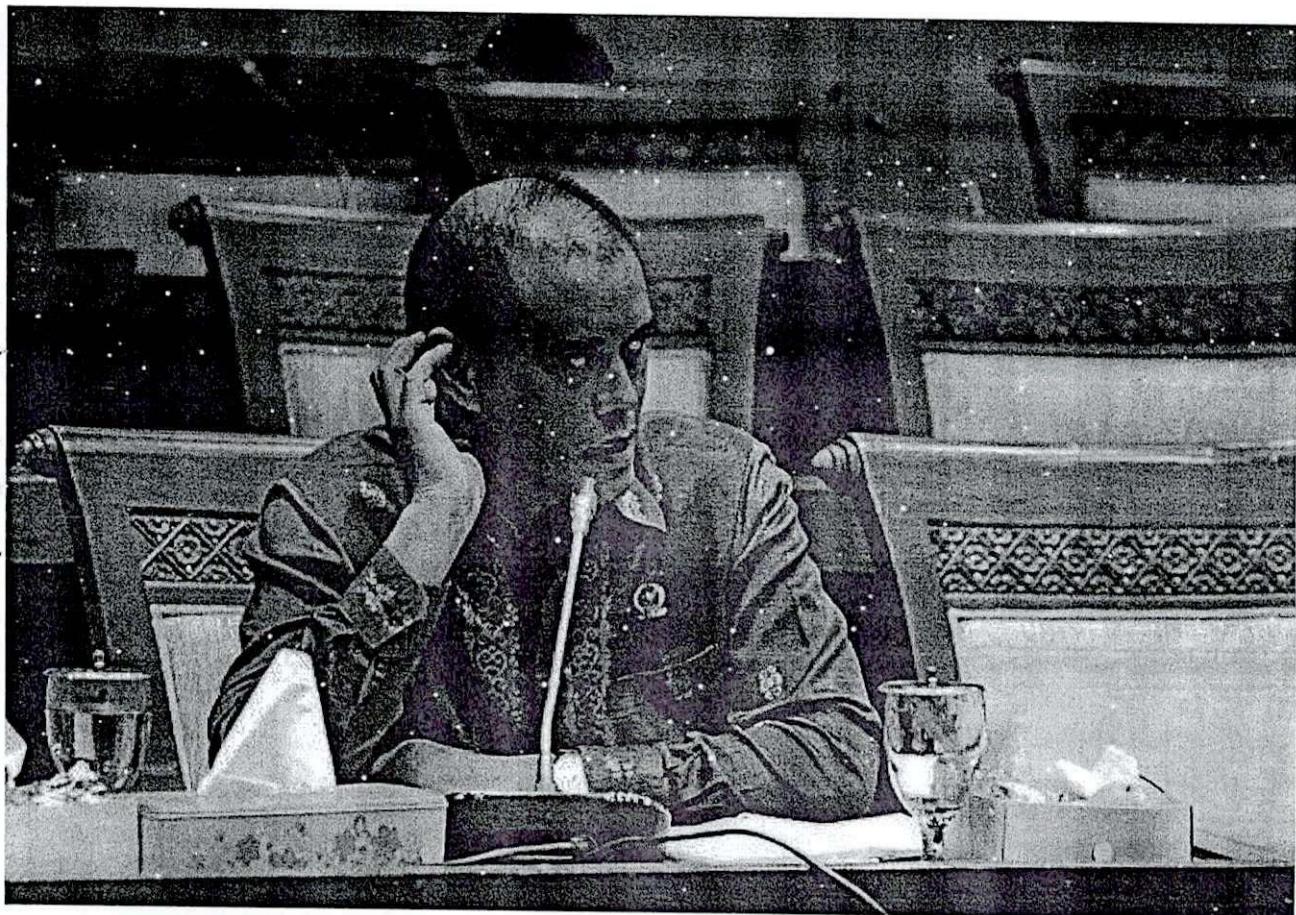


EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Biodiesel Harus Terealisasi Dengan Baik

26-09-2018 / KOMISI VI



Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani (F-NasDem)/Foto:Runi/Iw

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan kebijakan program biodiesel 20 persen (B20) yang dijalankan oleh pemerintah harus terealisasikan dengan baik. Sehingga harga kelapa sawit yang semula mengalami penurunan harga yang pesat dapat kembali normal.

Hal itu diungkapkan Hamdhani saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Pertamina, dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

"Program B20 ini harus terealisasi dengan baik dan berdampak terhadap kenaikan harga kelapa sawit, karena harga kelapa sawit sekarang ini sedang mengalami penurunan yang signifikan. Kalau pemerintah merealisasikan dengan baik, maka harga-harga kelapa sawit yang tadinya rendah akan terangkat kembali," dorong Hamdhani.

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, pemerintah juga harus memberikan jaminan kepada petani-petani kelapa sawit agar hak-hak dan keuntungan dapat tercapai dengan baik. Karena terdapat 2 juta petani Indonesia yang mengalami dampak dari harga kelapa sawit yang turun terutama di Riau, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Pemerintah harus memberikan jaminan juga dengan petani kelapa sawit. Jangan hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan keuntungan karena petani di Indonesia tepatnya di Riau, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Terdapat 2 juta bahkan lebih petani yang mengalami dampak dari harga yang begitu pesat," imbuh legislator dapil Kalteng itu.

Seperti yang diketahui, program B20 ini bisa menimbulkan *multiplier effect* bagi produsen minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) maupun harga Tandan Buah Segar (TBS) di pasar domestik. Program B20 diharapkan akan meningkatkan pembelian CPO di pasar domestik oleh perusahaan penjual bahan bakar minyak (BBM), sehingga pasokan ekspor CPO di pasar global berkurang dan bisa memicu kenaikan harga CPO. (tn/sf)

detikfinance

Home | Ekonomi Bisnis | Finansial | SolusiUKM | Perencanaan Keuangan | Properti | Energi | Industri | d'Preneur | Indeks
 NEW
 Infrastruktur · Konsultasi · Infografis · Bursa Valas · Moneter · Market Research · Foto · BizVideo · Most Popular · Fokus · Lowongan Pekerjaan

Indeks / Energi / Detail Berita

Follow detikFinance

Rabu, 26 Sep 2018 13:30 WIB

DPR Panggil Kementerian BUMN dan Pertamina Bahas Biodiesel 20%

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance

0 komentar



Foto: Achmad Dwi Afriyadi/detikFinance

Jakarta - Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina (Persero) dalam rangka Rapat Dengan Pendapat (RDP) terkait implementasi biodiesel 20% atau B20.

Rapat digelar sekitar pukul 12.00 WIB. Dari Kementerian BUMN, hadir Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno.

Baca juga: Pemerintah bakal Evaluasi Penggunaan Biodiesel 20% untuk Alutsista

Kemudian, dari Pertamina yakni Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Gandhi Sriwidodo dan Direktur Pemasaran Korporat Basuki Trikora Putra.



BERITA TERBARU

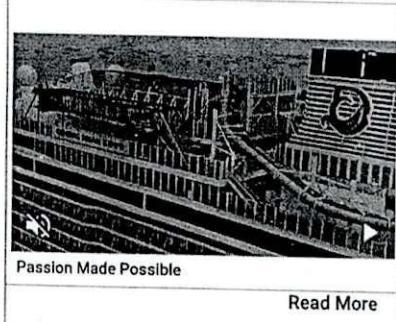
Melihat Prospek Bisnis Pembangunan Rumah 'Nempel' Stasiun
Rabu, 26 Sep 2018 19:15 WIB

Wus....!! Ini Kereta Cepat yang Menghubungkan Mekah-Madinah
Rabu, 26 Sep 2018 18:59 WIB

Miniatyr GWK Jadi Souvenir IMF-World Bank Meeting
Rabu, 26 Sep 2018 18:58 WIB

Harga Telur di Peternak Tak Boleh Lebih Murah dari Rp 18.000/Kg
Rabu, 26 Sep 2018 18:46 WIB





Ketua Komisi VI Teguh Juworno memimpin sekaligus membuka rapat tersebut. Dia mengatakan, rapat ini dihadiri oleh 13 anggota dari 7 fraksi sehingga memenuhi syarat untuk rapat.

Baca juga: Pertamina Kekurangan Pasokan Minyak Sawit untuk Biodiesel 20%

"Dengan mengucapkan bismillah izinkan saya membuka RDP dan rapat terbuka untuk umum," kata dia membuka rapat di Komisi VI Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam rapat kali ini anggota dewan ingin mengetahui progres kebijakan B20 yang diterapkan pemerintah.

"Kami ingin mendengar secara langsung, sejauh mana B20 dari pemerintah dan bagaimana pemerintah mengamankan kebijakan B20 agar terlaksana," ujarnya.

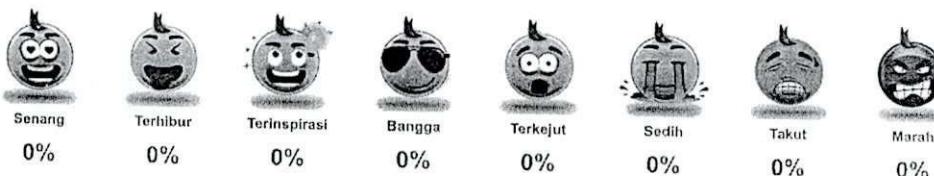
Baca juga: Pemerintah Mau Atur Jangka Waktu Pemesanan Biodiesel 20%

Bukan hanya itu, anggota dewan juga ingin mengetahui dampaknya penggunaan B20 pada operasional pengguna.

"Terkait hal-hal yang menyangkut B20 termasuk implikasinya, kegiatan operasional industri, misal KAI, PLN, dan juga pengawasan. Kegiatan pengawasan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan kualitas dan kuantitas," ujarnya. (hns/hns)

biodiesel 20 persen biodiesel kementerian bumn pertamina dpr

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?



Berita Terkait

Rapat Pertamina dan DPR soal Impor Minyak Tertutup, Ini Alasannya

Baru 62%, Pasokan Minyak Sawit untuk B20 Pertamina Tersendat

Pemerintah bakal Evaluasi Penggunaan Biodiesel 20% untuk Alutsista

Beli Elpiji di Minimarket, Bisa Dapat Mercy dan Harley

2 Minggu Lagi Badan Usaha Tak Jual B20 Kena Denda Rp 6.000/Liter

DPR dan Pertamina Rapat Tertutup Bahas Impor Minyak

Produksi Minyak Pertamina EP Asset 3 Tembus 102% dari Target

Pejabat Kementerian ESDM hingga TNI Merapat ke Kantor Darmin

Baca Juga



MOST POPULAR

MOST COMMENTED

01 Rizal Ramli Sebut Jokowi Salah Ambil Kebijakan Ekonomi

02 Lulus CPNS Tak Boleh Resign 10 Tahun, Ini Sanksinya Jika Dilanggar

03 Rizal Ramli Sebut Pelemahan Rupiah Baru Permulaan

04 Mengupas Masalah SNP Finance yang Bikin Rugi hingga Rp 4 T

05 Aturan Tarif Tol Naik saat Macet akan Diterapkan di RI

06 OJK Beberkan Awal Perjalanan Kasus SNP Finance

07 Dibangun Rp 165 M, Begini 'Jeroan' Pos Lintas Batas Skouw

08 Seal Tarif Pajak Impor Naik, Rizal Ramli: Kebijakan Ecek-ecek

09 Pengembang Swasta Ingin Ikut Bangun Rusun Nempel Stasiun

10 Pendaftaran Akun CPNS Dibatasi, Hanya 2 Juta per Hari

SELENGKAPNYA

MOST POPULAR

MOST COMMENTED

01 Rizal Ramli Sebut Jokowi Salah Ambil Kebijakan Ekonomi

02 Lulus CPNS Tak Boleh Resign 10 Tahun, Ini Sanksinya Jika Dilanggar

03 Rizal Ramli Sebut Pelemahan Rupiah Baru Permulaan

04 Mengupas Masalah SNP Finance yang Bikin Rugi hingga Rp 4 T

05 Aturan Tarif Tol Naik saat Macet akan Diterapkan di RI

06 OJK Beberkan Awal Perjalanan Kasus SNP Finance

07 Dibangun Rp 165 M, Begini 'Jeroan' Pos Lintas Batas Skouw

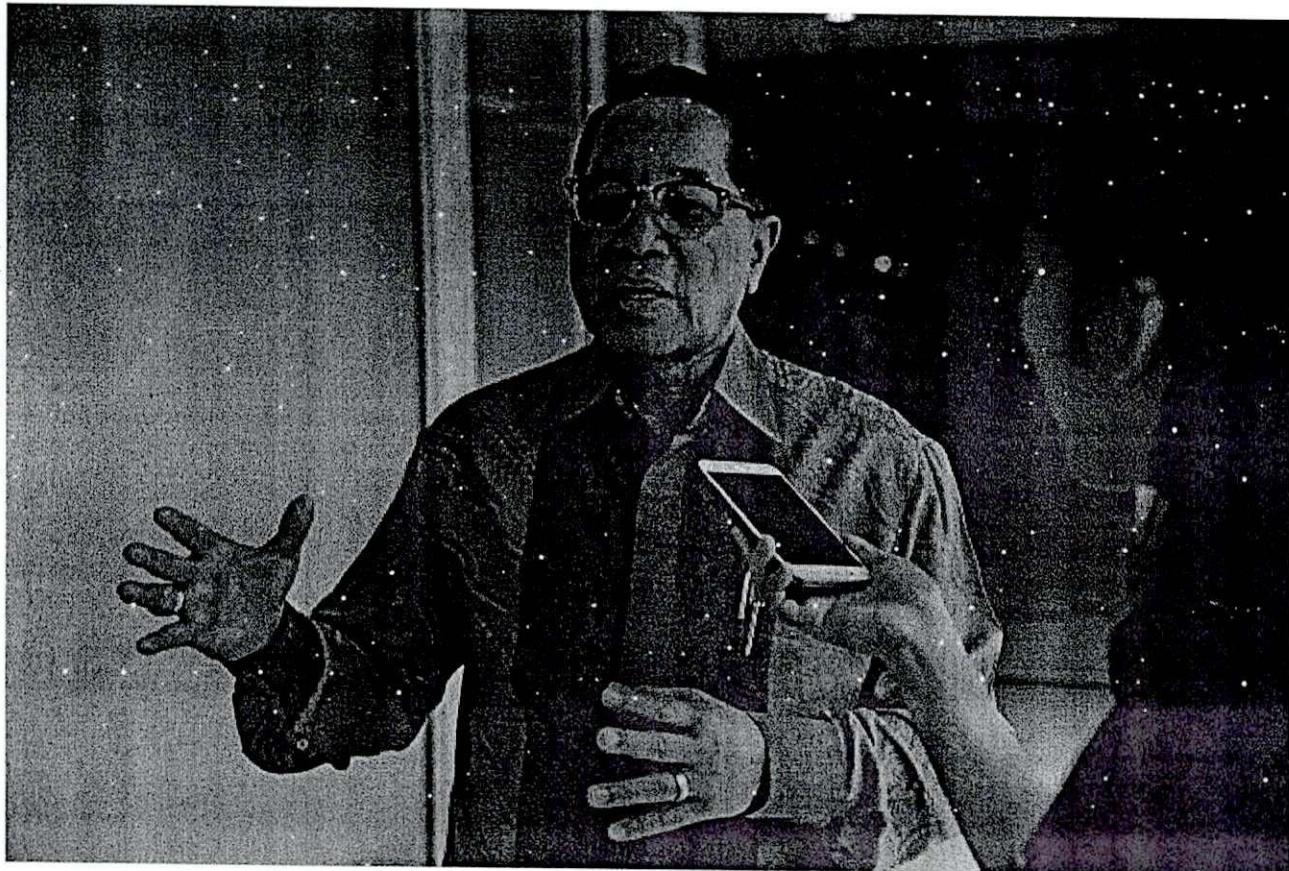


EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Kinerja Dukcapil

19-09-2018 / KOMISI II



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo memberikan keterangan. Foto : Jayadi/Rni

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo dengan tegas meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) terkait rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan memblokir data penduduk dewasa yang belum merekam data hingga batas akhir 31 Desember 2018.

“Tidak bisa bertindak arrogan seperti itu. Ini kan hak masyarakat, pemerintah harusnya lebih banyak mengevaluasi kinerja daripada aparaturnya. Mendagri harusnya melihat Dukcapil ini sudah maksimal atau belum,” tegas Firman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Fakta di lapangan, Firman banyak menemukan di banyak kantor desa dan kantor kecamatan, alat perekam KTP tidak berfungsi dengan baik. Kemudian formulir dan blangko KTP juga belum tersedia. Belum lagi jarak tempat tinggal warga yang ada di perkebunan dengan desa terkadang sangat jauh.

“Semua ini dan juga harus dilihat sebab-masababnya, tidak semua penduduk Indonesia seperti di Jakarta yang dengan mudah mendatangi keluarahan. Faktor geografis dan masalah teknis di lapangan harus diperhitungkan,” terang politisi Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, tidak baik baik pemerintah mengancam warga negaranya yang memiliki hak untuk mendapatkan identitas. Karena yang berkewajiban melakukan perekaman adalah pemerintah. “Saya minta, jangan dilakukan itu. Apalagi menjelang Pemilu yang tingkat sensitifitasnya sangat tinggi. Jangan sampai hak warga negara itu dikurangi apalagi diberikan ancaman seperti itu,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah ini.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakhrulloh, mengatakan masih ada 6.045.629 orang penduduk belum melakukan perekaman data KTP-Elektronik. Kemendagri memberikan waktu hingga 31 Desember 2018 agar masyarakat proaktif menuntaskan perekaman data. Kebijakan memblokir data penduduk yang akan diterapkan setelahnya. Usai diblokir, sejumlah konsekuensi akan ditanggung masyarakat. (es/sf)



vs > Nasional

nendagri Diminta tak Gegabah Blokir Data Penduduk

September 2018 19:38 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Indira Rezkisari

Wednesday, 26 Sep 2018

18:32:53

JAKARTA

republika.co.id

ISYA
18:57

KTP elektronik

Foto: dok. Republika

Masih ditemukan sejumlah daerah yang terkendala dengan alat KTP-EI.

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kinerja aparaturnya dalam menyosialisasikan perekaman KTP-EI ke masyarakat. Hal itu disampaikan Firman menyusul rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan memblokir data penduduk dewasa yang belum merekam hingga batas akhir 31 Desember 2018.



TERPOPULER



"Sebelum pemerintah itu memblokir tentu pemerintah itu harus mengevaluasi apakah kinerjanya, aparaturnya, sekarang ini beres apa tidak, jangan hanya warga negara masyarakat yang dikenakan sanksi, tapi justru mengevaluasi dirinya," ujar Firman saat dihubungi wartawan, Senin (17/9).

Beberapa daerah ternyata masih memiliki kendala dengan alat perekaman KTP-El. Selain itu petugas di daerah juga belum secara masif menyosialisasikan perekaman KTP-El hingga pelosok daerah.

"Setelah kita datangi di beberapa daerah kemudian juga tingkat desa, ternyata dia itu juga alat-alatnya bermasalah juga gitu, artinya kesalahan itu kan bukan kesalahan warga masyarakat," kata Firman. Karenanya, politikus Partai Golkar itu pun tidak setuju jika Kemendagri berencana menerapkan kebijakan memblokir data penduduk sebelum mencari penyebab masih adanya penduduk yang belum merekam KTP-El. Ia meminta agar Kemendagri menganalisis mengapa masih ada penduduk yang belum merekam KTP el tersebut.

"Ini kita belum tau apakah semua perangkat di desa, kecamatan itu punya alat itu dan apakah alat itu berfungsi atau tidak kan kita belum tau, kan juga perlu evaluasi. Jangan rakyat yang dikorbankan," ujar Firman.

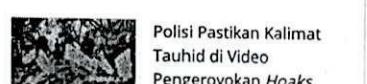
Firman menilai Kemendagri saat ini harusnya lebih maksimal menyosialisasikan ke masyarakat dan membantu masyarakat yang belum merekam KTP-El. "Evaluasi apakah sebabnya masyarakat tidak mau merekam, saya yakin kalau mereka tau KTP-El itu penting saya rasa mereka mau, mungkin sosialisasinya sangat kurang, jadi jangan rakyat diancam tetapi justru pelayanan publik ini dari pemerintah ini dievaluasi atau dimaksimalkan," ungkap Firman.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengimbau penduduk dewasa yang belum melakukan perekaman agar segera mendatangi Disdukcapil terdekat untuk merekam. Sebab, jika sampai 31 Desember 2018 belum juga merekam, maka Ditjen Dukcapil akan memblokir data penduduk tersebut.

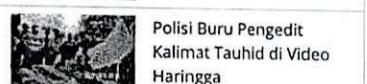
Data Dirjen Dukcapil menyebut terdapat 6 juta penduduk dewasa yang belum merekam data KTP elektronik. Tanpa perekaman KTP elektronik, 6 juta penduduk itu tidak bisa menjalankan haknya pada Pemilu 2019 mendatang.

Polisi: Tak Ada Kalimat Tauhid di Pengeroyokan Haringga

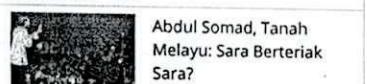
Selasa , 25 September 2018, 12:12 WIB



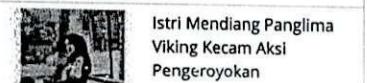
Polisi Pastikan Kalimat Tauhid di Video Pengeroyokan Hoaks



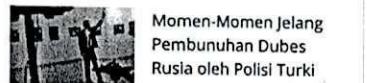
Polisi Buru Pengedit Kalimat Tauhid di Video Haringga



Abdul Somad, Tanah Melayu: Saran Berteriak Saran?



Istri Mendiang Panglima Viking Kecam Aksi Pengeroyokan



Momen-Momen Jelang Pembunuhan Dubes Rusia oleh Polisi Turki

IN PICTURES



In Picture: Yenny Wahid Dukung Jokowi-Ma'ruf

Rabu , 26 September 2018, 18:11 WIB

INFOGRAFIS



NASKAH BERITA BKD TERIMA DPRD KABUPATEN PATI

Judul: Informasi dari Provinsi Dibutuhkan oleh Kabupaten dalam Pembahasan APBD

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan alokasi anggaran yang ada pada APBD, terutama dari Provinsi, secara mekanisme itu sudah tercantum dalam APBD lengkap dengan nominalnya, beda halnya dengan DPR RI yang memang dilakukan secara transfer.

“ mereka itukan hanya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana supaya DPRD itu mendapatkan informasi berkaitan dengan alokasi anggaran yang ada pada APBDnya, terutama yang dari provinsi, nah kalau dilihat dari mekanismenya sebetulnya ya menurut kita, dan itu yang kita sampaikan ya pasti misalnya nantinya itukan akan ada di dalam APBDnya sendiri. Tidak mungkin misalnya ada anggaran daerah tanpa nominalnya di sebutkan. Nah hanya memang mereka ingin lebih mengetahui sebelum penyampaian APBDnya , kalau itu kan bisa saja dilakukan lewat mekanisme misalnya minta informasi dari provinsi, beda kalau yang dari DPR pusat kan memang transfer,”ungkapnya usai menerima Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati, terkait konsultasi tugas pokok dan fungsinya juga materi dan regulasi pembahasan APBD Tahun Anggaran 2019. Pertemuan dihadiri juga oleh Kepala Pusat Kajian Anggran Asep Ahmad Saefullah, di ruang rapat BKD, Senayan , Jakarta, Senin (24/09/18).

Selain itu, Jhonson juga memaparkan keluhan dari DPRD Kabupaten Pati yang menyatakan bahwa dalam pembahasan APBD seringkali DPRD Kabupaten lebih dahulu selesai menyusun ketimbang DPRD Provinsi, apakah hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya pembahasan APBD.

Untuk itu, Johnson menyampaikan bahwa di dalam mekanisme yang ada, harus terlebih dahulu selesai pembahasan APBN yang kemudian selanjutnya akan turun ke Provinsi,Kabupaten dan selanjutnya. Jika, menurut DPRD Kabupaten Pati, DPRD Provinsi kerap belum menyelesaikan pembahasannya, dimungkinkan karena di Provinsi ada dana untuk Kabupaten atau dana perimbangan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Sementara Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati Muhammadun mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan masalah-masalah dana yang ada dari APBN, Khususnya Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan dana-dana yang lainnya, guna mempermudah pembahasan APBD agar dapat direncanakan dengan tepat.

“di dalam pembahasan APBD hari-hari ini kita membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di daerah, dan sudah selesai untuk mungkin bulan depan kita akan bicarakan tentang anggarannya. Sejauh ini tidak ada masalah yang terlalu sulit tapi kadang-kadang dana dari provinsi ini pengesahannya atau keputusannya penetapannya itu lebih dulu kabupaten daripada provinsi, sehingga untuk mengakomodir dana provinsi itu kita agak kesulitan,” tutupnya. -Ndy-



EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BK DPR Terima Konsultasi DPRD Pati terkait Pembahasan APBD

24-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan konsultasi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah/Foto:Arief/Iw

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan konsultasi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, terkait tugas pokok dan fungsinya, serta regulasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pertemuan di ruang rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018) itu, turut hadir Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI Asep Ahmad Saefulloh.

Saat pertemuan terungkap, DPRD Kabupaten Pati menyatakan bahwa dalam pembahasan APBD di DPRD Pati, seringkali DPRD Pati lebih dahulu menyelesaikan pembahasannya ketimbang pembahasan APBD di DPRD Provinsi. Untuk itu, DPRD Pati mempertanyakan apakah hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya pembahasan APBD.

"Dalam mekanisme yang ada, harus terlebih dahulu selesai pembahasan APBN, yang selanjutnya akan turun ke provinsi, kabupaten atau kota. Jika, menurut DPRD Pati, DPRD Provinsi kerap belum menyelesaikan pembahasannya, dimungkinkan karena di provinsi ada dana untuk kabupaten atau dana perimbangan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelas Johnson.

Di sisi lain, Johnson menjelaskan, bagi DPRD kabupaten dan kota yang ingin mengetahui anggaran APBD-nya yang dibahas oleh DPRD Provinsi secara mekanisme itu sudah tercantum dalam APBD lengkap dengan nominalnya. Menurutnya, beda halnya dengan DPR RI yang memang dilakukan secara transfer.

"Kalau dilihat dari mekanismenya, menurut kita, itu akan ada di dalam APBD-nya sendiri. Tidak mungkin misalnya ada anggaran daerah tanpa nominalnya disebutkan. Nah hanya memang mereka ingin lebih mengetahui sebelum penyampaian APBD-nya. Kalau itu bisa saja dilakukan lewat mekanisme, misalnya minta informasi dari provinsi. Beda kalau yang dari DPR RI kan memang transfer," imbuhan Johnson usai pertemuan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati Muhammadun mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan masalah-masalah dana yang ada dari APBN, khususnya Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan dana-dana yang lainnya, guna mempermudah pembahasan APBD di DPRD Pati, agar dapat direncanakan dengan tepat.

"Di dalam pembahasan APBD, kita membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di daerah, dan mungkin sudah selesai bulan depan. Sejauh ini tidak ada masalah yang terlalu sulit, tapi kadang-kadang dana dari provinsi ini keputusannya itu lebih dulu kabupaten daripada provinsi, sehingga untuk mengakomodir dana provinsi itu kita agak kesulitan," tutupnya. (ndy/sf)

Tata Beracara MKD Akan Libatkan Polri dan Kejaksaan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) Tb. Soenmandjaja mengatakan MKD akan melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan, dalam leksanakan tata beracara.

"Kami (MKD) juga sebagai anggota pasti ada subyektifitasnya lah, tapi kalau kepolisan dan kejaksaan beserta masyarakat luas tentu akan lebih obyatif. Yang kedua, daya jangkau kita sangat terbatas hanya di DPR saja," katanya saat mengikuti kunjungan sosialisasi kode etik dan tata beracara MKD dengan Kapolda Sulawesi Selatan (Suksel) Inspektur Jenderal Polisi Umar Septono dan Kajati Sulsel Tarmizi beserta jajarannya, di Mapolda Sulsel, beberapa waktu lalu.

MKD memprogramkan kunjungan kerja ke polda dan kejati seluruh Indonesia, dalam rangka mensosialisakan dan menyampaikan tentang kode etik, pedoman kerja dan tata beracara MKD serta Undang Undang tentang MD3 yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dari 560 anggota dewan ini, berasal dari 77 daerah pemilihan seluruh Indonesia. Jadi ketika yang bersangkutan ada di dapilnya misalnya ada masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum ataupun terutama dengan etika maka MKD sangat peduli dan sekaligus juga mohon bantuan baik pada Kapolda dan jajarannya maupun Kajati dan jajarannya.

"Memohon masukan baik mengenai kode etik maupun tentang tata beracaranya. Apalagi Polri dan kejaksaan yang menangani khususnya amanat UU No. 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), ini sangat penting bagi kami (MKD) dalam berproses," ujarnya.

Selanjutnya, berkembang juga saran dalam kunjungan ini misalnya dalam pembentukan panel bagaimana MKD menyertakan disamping para ahli, karena komposisinya ada 3 dari MKD dan 4 dari luar atau non-MKD yaitu dari ahli dan praktisi.

"Ada usulan juga bagaimana unsur dari polri dan unsur kejaksaan bisa dimasukan di sana. Hal ini masih dalam proses kajian," katanya.

Bantuan yang diharapkan dari polri dan kejaksaan dalam proses menegakan kedisiplinan dan penegakan hukum untuk menjaga marwah dan kehormatan institusi DPR, yaitu lebih kepada komunikasi yang pertama, yang kedua apabila memang diduga ada tindakan atau masalah yang bermuatan hukum kami (MKD) diinformasikan diberitahu.

Lebih lanjut, dijelaskan, apabila ternyata dalam perkembangannya menyangkut masalah pidana baik khusus atau umum maka MKD tidak ikut serta di situ. MKD

Tata Beracara MKD Akan Libatkan Polri dan Kejaksaan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) Tb. Soenmandjaja mengatakan MKD akan melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan, dalam leksanakan tata beracara.

"Kami (MKD) juga sebagai anggota pasti ada subyektifitasnya lah, tapi kalau kepolisan dan kejaksaan beserta masyarakat luas tentu akan lebih obyatif. Yang kedua, daya jangkau kita sangat terbatas hanya di DPR saja," katanya saat mengikuti kunjungan sosialisasi kode etik dan tata beracara MKD dengan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Inspektur Jenderal Polisi Umar Septono dan Kajati Sulsel Tarmizi beserta jajarannya, di Mapolda Sulsel, beberapa waktu lalu.

MKD memprogramkan kunjungan kerja ke polda dan kejati seluruh Indonesia, dalam rangka mensosialisakan dan menyampaikan tentang kode etik, pedoman kerja dan tata beracara MKD serta Undang Undang tentang MD3 yang berkaitan dengan Mahkamah Kehormatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dari 560 anggota dewan ini, berasal dari 77 daerah pemilihan seluruh Indonesia. Jadi ketika yang bersangkutan ada di dapilnya misalnya ada masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum ataupun terutama dengan etika maka MKD sangat peduli dan sekaligus juga mohon bantuan baik pada Kapolda dan jajarannya maupun Kajati dan jajarannya.

"Memohon masukan baik mengenai kode etik maupun tentang tata beracaranya. Apalagi Polri dan kejaksaan yang menangani khususnya amanat UU No. 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), ini sangat penting bagi kami (MKD) dalam berproses," ujarnya.

Selanjutnya, berkembang juga saran dalam kunjungan ini misalnya dalam pembentukan panel bagaimana MKD menyertakan disamping para ahli, karena komposisinya ada 3 dari MKD dan 4 dari luar atau non-MKD yaitu dari ahli dan praktisi.

"Ada usulan juga bagaimana unsur dari polri dan unsur kejaksaan bisa dimasukan di sana. Hal ini masih dalam proses kajian," katanya.

Bantuan yang diharapkan dari polri dan kejaksaan dalam proses menegakan kedisiplinan dan penegakan hukum untuk menjaga marwah dan kehormatan institusi DPR, yaitu lebih kepada komunikasi yang pertama, yang kedua apabila memang diduga ada tindakan atau masalah yang bermuatan hukum kami (MKD) diinformasikan diberitahu.

Lebih lanjut, dijelaskan, apabila ternyata dalam perkembangannya menyangkut masalah pidana baik khusus atau umum maka MKD tidak ikut serta di situ. MKD

serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku, nanti setelah selesai dari proses kejaksaan dan kepolisian atau pengadilan, baru MKD masuk ke ranah itu.

Apabila ada pelanggaran etika dipastikan tidak sertamerta dia melanggar hukum, tapi kalau melanggar hukum dipastikan ini melanggar etika.

"MKD sangat konsen dalam penegakan etika, hal ini bertujuan, DPR inikan lembaga politik dari amanat undang undang dasar dan sekaligus juga penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia melalui pemilu, jadi sangat wajar apabila DPR berkepentingan untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga yang sekaligus para anggotanya," tegasnya. (as)



EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DPR Tuntut Penyelesaian Masalah Aset Negara di Bali

01-08-2018 / KOMISI XI



Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno foto : Nadia/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menyoroti kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, terkait adanya beberapa aset negara yang belum dilakukan penanganannya secara optimal.

"Karena walaupun sudah di-back up oleh regulasi sampai peraturan menteri, penanganan aset negara itu juga masih mengalami kendala-kendala," ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (30/7/2018).

Michael juga mengkritisi efektifitas daripada terbentuknya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam mengelola dan mengoptimalkan aset-aset Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dikerjasamakan tersebut.

Perlu diketahui bahwa sejak hampir 3 tahun lalu, Kementerian Keuangan telah membuat Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah juga menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Komisi XI DPR RI.

"Dari kerja sama antara Kemenkeu dan LMAN tersebut, sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara. Apalagi kita tahu bahwa ketergantungan APBN kita kepada pajak, dan harus kita tambah terhadap penerimaan negara dari bukan pajak. Alternatif-alternatif penerimaan negara seperti ini harus digali oleh lembaga seperti LMAN ini," tandasnya.

Sehingga politisi PDI Perjuangan ini juga berharap supaya aset-aset negara yang dikelola Kemenkeu itu bisa dioptimalkan melalui LMAN yang sudah didukung oleh Komisi XI DPR RI melalui PMN tersebut.

Senada dengan Michael, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo juga memberikan perhatian khusus tentang pengelolaan aset, utamanya barang milik negara. Mengingat, di Bali telah diketahui bahwa ternyata ada aset-aset yang barang milik negara ini yang telah menghadapi gugatan.

"Kita menghendaki agar percepatan dari proses kepemilikan dari aset-aset tersebut dapat segera dilakukan," tutup politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu. (ndy/sf)





EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KPU dan Bawaslu Mengajukan Tambahan Anggaran pada RAPBN 2019

02-07-2018 / KOMISI II



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh (FPKB)/Foto:Andri/Iw

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Abhan mengajukan tambahan pagu indikatif tahun 2019 saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (02/7/2018).

Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan, hari ini Komisi II menggelar RDP dengan KPU dan Bawaslu untuk membahas R-APBN tahun 2019. Dalam rapat, Ketua KPU mengajukan pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp15 triliun.

"KPÜ juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp13 triliun, diantaranya untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Tambahan honor dan operasional panitia pemungutan suara. Biaya pemilu luar negeri khusus untuk pemilih visa pos yang diprediksi 40 persen," jelas Nini, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta.

Sementara, lanjut Politisi F-PKB itu, Ketua Bawaslu mengajukan pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp8 triliun. Dan meminta tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun.

"Bawaslu menjelaskan arah kebijakan Bawaslu tahun 2019 diantaranya untuk pengembangan dan sosialisasi pengawasan pemilu partisipasi, pengembangan kelembagaan Bawaslu, fasilitasi sentra Gakumdu, pendidikan pengawas partisipasi di pusat dan 34 daerah," jelasnya.

Diakhir rapat, Nini mengatakan rapat hanya menerima pengajuan pagu indikatif yang disampaikan dan akan dilakukan pembahasan mendalam di rapat selanjutnya.

"ini hanya menerima pengajuan pagu indikatif tahun 2019, akan ada pendalaman, tapi nanti," ungkapnya. (rnm/sc)





EN ID

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP

20-09-2018 / BADAN ANGGARAN



Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun malah dikelola langsung oleh lembaga di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Banggar DPR RI Nasril Bahar menyebutkan apabila dimasukkan ke dalam PNBP, maka dana tersebut nantinya bisa banyak manfaatnya. Ia meminta bahwa sebaiknya ada badan yang mengelola dan bisa dijadikan menjadi salah satu mitra komisi di DPR agar dapat dilakukan pengawasan langsung.

"Dana sawit ini bisa dikelola dan diperuntukkan langsung untuk *replanting* dan pengembangan *refinery* terhadap biodiesel. Nah, selama ini belum ada dalam kemitraan di salah satu dari 11 komisi di DPR, sehingga fungsi kontrol pendapatannya itu masih ada di Kementerian Keuangan," tuturnya dalam rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2018).

Anggota Komisi VI DPR RI ini melihat tidak adanya penanaman berkelanjutan dalam perkebunan rakyat ketika melakukan tinjauan. Untuk itu, ia ingin mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap pungutan kelapa sawit tersebut.

"Sebagai catatan terhadap replanting perkebunan sawit rakyat, itu tidak menjamah terhadap potensi untuk kelanjutan perkebunan. Tentunya kami ingin tahu sejauh mana pengawasan terhadap pemanfaatan pungutan daripada bea keluar dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang dimaksud," tegas politisi PAN tersebut.

Senada dengan Nasril, Anggota Banggar DPR RI Daniel Lumban Tobing menambahkan bahwa B-20 biodiesel yang merupakan program pemerintah untuk meng-*endorse* minyak kelapa sawit ini. Ia menegaskan harus ada kejelasan tentang penentuan harganya.

"Kita mengetahui program pemerintah yaitu B-20 adalah untuk meng-*endorse* perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ini harus ada kejelasan, siapa *sih* yang menentukan harganya. Itu harus dijawab," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut. (eps/sf)



Iklan ditutup oleh Google

Laporkan iklan ini

Mengapa iklan ini? ⓘ

Home / Ekonomi / Makro

Anggota DPR dari Gerindra Ingin Pertumbuhan Ekonomi RI 10 Persen

ANDRI DONNAL PUTERA

Kompas.com - 18/09/2018, 12:53 WIB



Suasana rapat membahas RAPBN 2019 di Badan Anggaran DPR RI, Selasa (4/9/2018). (KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)



JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai Indonesia dengan anggaran yang besar dapat mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi per tahunnya jadi 10 persen.

Bambang turut membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi era Presiden Soeharto yang sempat menyentuh angka 12 persen.

"Saat kepemimpinan Presiden Soeharto, pertumbuhan ekonomi bisa sampai 12 persen alias dua digit. Sekarang dengan anggaran yang ratusan triliun rupiah kenapa cuma 5,2 persen?" kata Bambang dalam rapat bersama pemerintah di Badan Anggaran DPR RI, Selasa (18/9/2018).

Bambang juga memberi catatan tentang harga-harga bahan pokok yang melonjak tinggi sekali. Dia menyinggung salah satunya tentang harga daging sapi yang kini mencapai Rp 130.000, sementara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harga daging sapi belum semahal itu.

"Waktu banyak demo, foto pemimpin terdahulu ditempel di pantat sapi atau kerbau, itu harganya masih murah. Sekarang sudah di atas Rp 100.000, untung rakyat masih sabar," tutur Bambang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam pembukaan rapat menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi

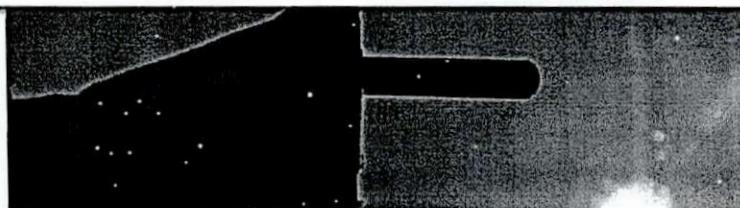
TERPOPULER

- 1 Buwas: Kalau Saya Enggak Bisa Seperti Bu Susi, Dikebiri Saja
Dibaca 74.487 kali

- 2 Mi Instan Jadi Candu Dunia, Indonesia Nomor 2 Pengonsumsi Tertinggi
Dibaca 54.134 kali

- 3 Ini Daftar 10 Raja, Ratu, dan Pangeran Terkaya di Dunia

Anggota DPR dari Gerindra Ingin Pertumbuhan Ekonomi RI 10 Persen



Dibaca 17.444 kali

5

Soekarno-Hatta Masuk Bandara Elite Versi Megahubs, Ini 3 Pencapaiannya

Dibaca 16.414 kali

Dunia Energi Indonesia Dipengaruhi Potensial

Industri energi Tantah Ar diakui memiliki berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Proyeksi tersebut didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang masih tinggi di atas 5 persen, investasi yang diharapkan bisa mencapai 7 persen atau lebih, dan menggejot ekspor.

Meski begitu, impor diperkirakan masih akan tinggi, yakni di atas 10 persen. Proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi ini turut dipengaruhi tantangan dari eksternal, seperti penguatan dollar AS, potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi global tahun ini, hingga perang dagang sampai ketegangan politik global.

Penulis : Andri Donnal Putera
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

TAG: harga bahan pokok pertumbuhan ekonomi
konsumsi rumah tangga

Berita Terkait

Tanpa Pembangunan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Lambat dari Sekarang

Pertumbuhan Ekonomi Sulit Capai 5,4 Persen, Ini Penjelasan Menko Darmin

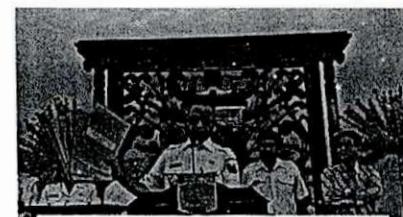
Sri Mulyani: Pelemahan Impor Berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ini Cara BI Agar Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 6 Persen

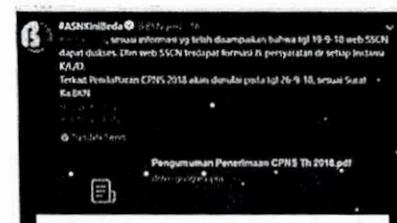
NOW TRENDING



Sejak Edy Rahmayadi Pimpin PSSI, Nyawa 22 Supoter Melayang



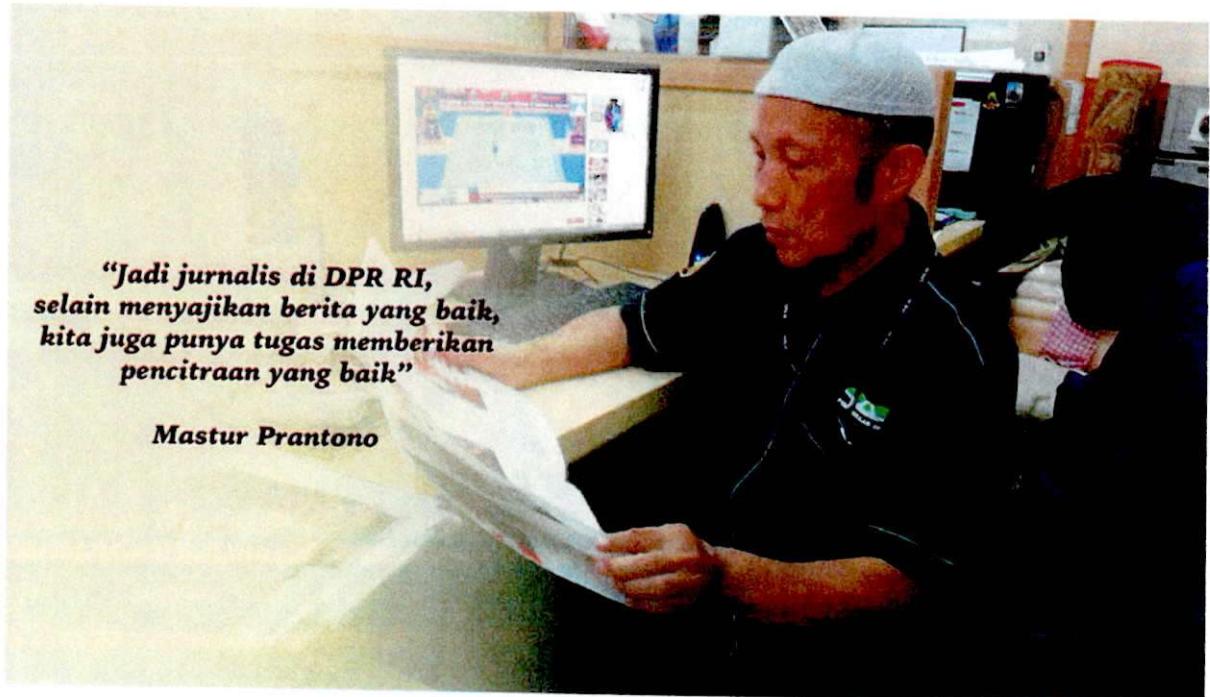
Ini Daftar 13 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta yang Dicabut Izinnya

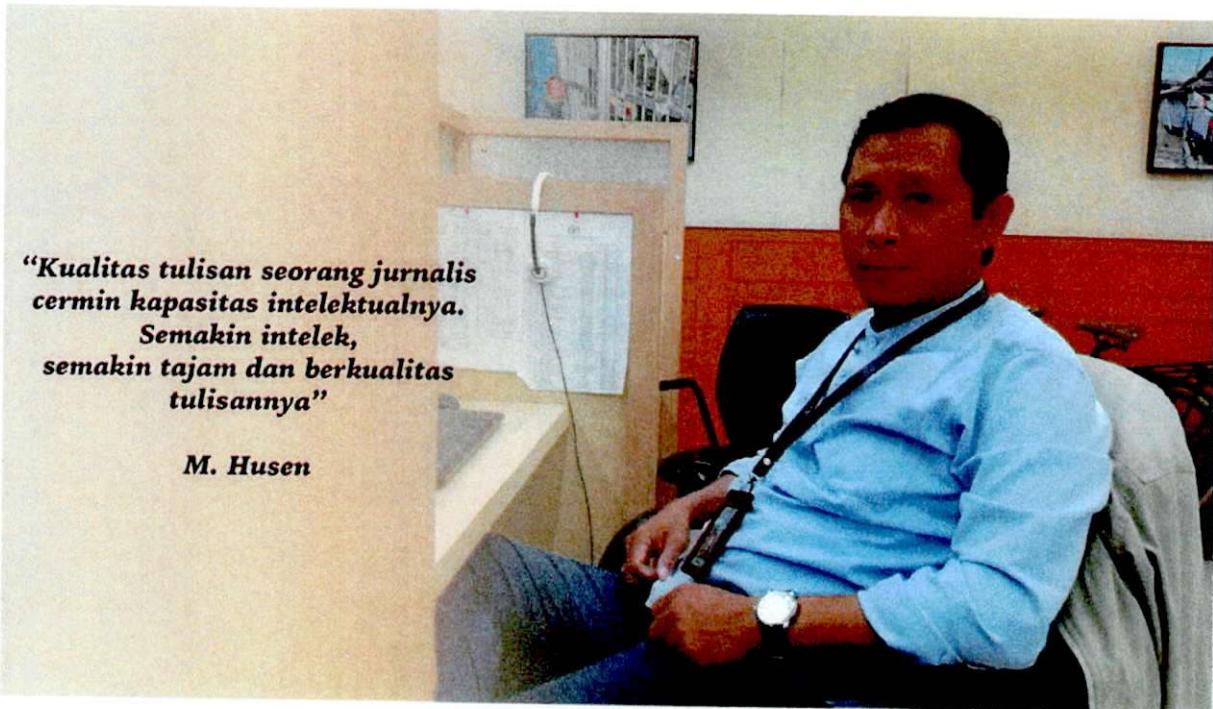


Pendaftaran CPNS Sulit Diakses, Ini Penjelasan BKN



Keluarga Gus Dur Dukung Jokowi-Ma'ruf, Ini Komentar Fadli Zon





*“Kualitas tulisan seorang jurnalis
cermin kapasitas intelektualnya.*

*Semakin intelek,
semakin tajam dan berkualitas
tulisannya”*

M. Husen



*“Jadi jurnalis dituntut untuk
meningkatkan kapasitas intelektual
dengan 4 C :
Communication, Collaboration,
Critical thinking and creativity”*

Suciati



"PARLEMENTARIA
Suara aspiratif wakil rakyat"

Agung Sulistiono